

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI I / SEPTEMBER 2025

Aksi Demo Berbuntut Anarkis

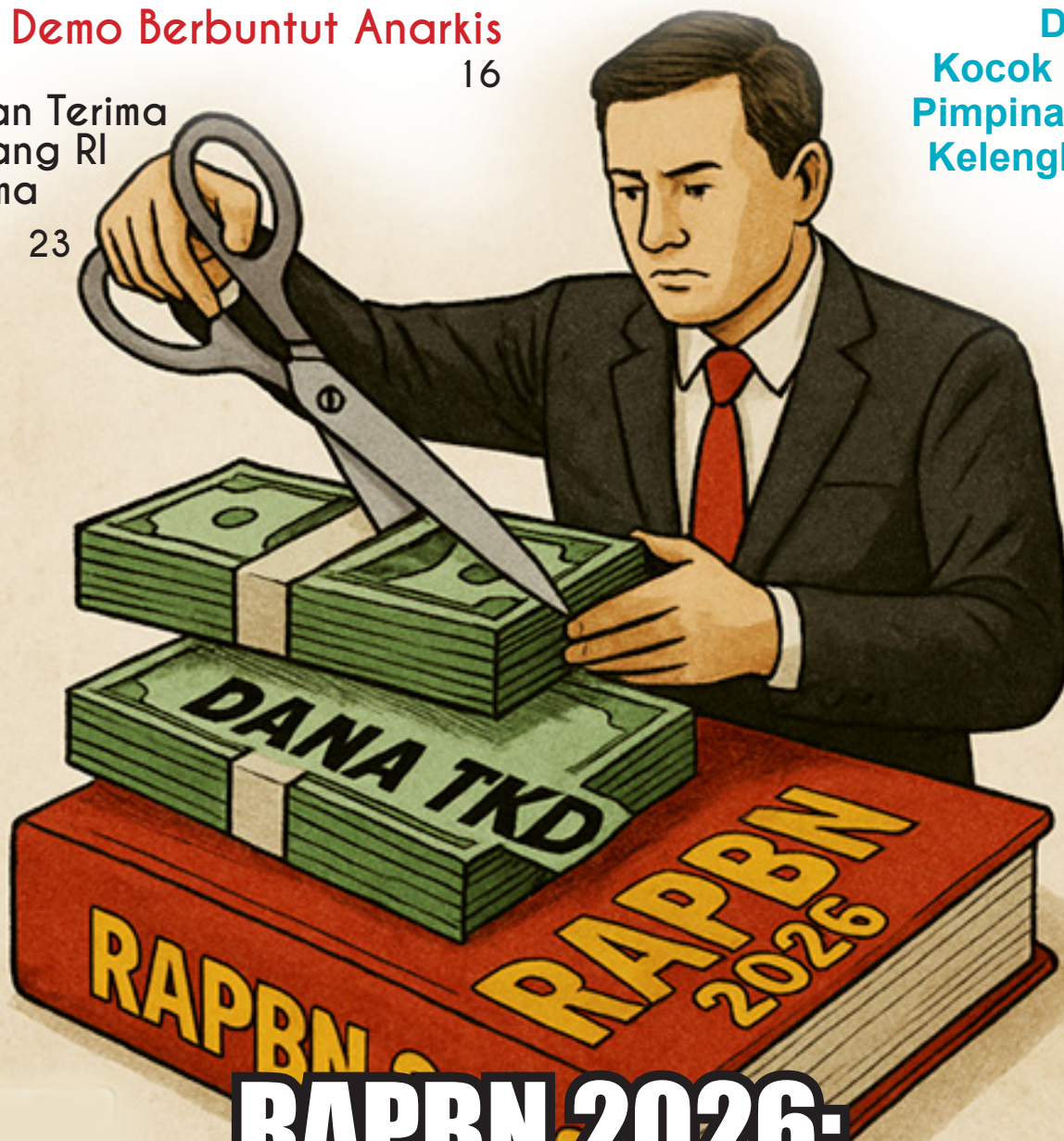
16

Sultan Terima
Bintang RI
Utama

23

DPD RI Kocok Ulang Pimpinan Alat Kelengkapan

38



**RAPBN 2026:
DANA TKD KEMBALI
DIPANGKAS**





Mencari Jalan Baru Kemandirian Fiskal Daerah

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 memunculkan perdebatan hangat di ruang publik. Fokusnya tak lain adalah kebijakan pemerintah memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan, dari Rp864,1 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp650 triliun pada tahun depan. Pemangkasan hampir 25 persen ini sontak menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini bertumpu pada aliran dana pusat untuk membiayai pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja negara. Pemerintah menilai, TKD selama ini belum sepenuhnya efektif dalam menggerakkan pemerataan kesejahteraan. Sebagai gantinya, anggaran akan lebih diarahkan melalui program-program lintas kementerian yang langsung menysasar masyarakat di daerah. Logika kebijakan ini sederhana, memotong jalur birokrasi yang panjang dan memastikan anggaran benar-benar sampai ke penerima manfaat.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mencoba melihat kebijakan ini dari sisi lain. Ia mengakui penurunan TKD yang cukup drastis, tetapi menekankan bahwa lebih dari separuh belanja negara tetap mengalir ke daerah, meskipun lewat skema program pusat. Menurutnya, pola ini justru bisa menghasilkan pembangunan yang lebih produktif dan terukur, mulai dari ketahanan pangan, koperasi, pendidikan, hingga program Makan Bergizi Gratis. Dengan begitu, meski transfer konvensional berkurang, porsi

APBN untuk daerah tetap signifikan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai kebijakan ini seharusnya menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah daerah ditantang untuk lebih inovatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk memanfaatkan instrumen pembiayaan kreatif seperti obligasi daerah. Dengan tata kelola yang baik, instrumen ini tidak hanya mendatangkan dana segar, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kapasitas fiskal daerah.

Namun, optimisme itu tidak boleh menutup mata dari risiko yang nyata. Tanpa strategi pendamping yang matang, pemangkasan TKD bisa memperlebar jurang kesenjangan antarwilayah. Daerah dengan basis ekonomi lemah berpotensi tertinggal semakin jauh. Karena itu, selain menyalurkan anggaran pusat melalui program, pemerintah perlu memastikan adanya formula khusus bagi daerah yang rentan agar tidak terpinggirkan dari arus pembangunan nasional.

Pada akhirnya, kebijakan ini adalah ujian bagi semua pihak. Pemerintah pusat harus konsisten menjaga efektivitas program lintas kementerian, sementara pemerintah daerah wajib meningkatkan kreativitas fiskalnya. Jalan menuju kemandirian fiskal memang tidak mudah, tetapi jika pusat dan daerah mampu berjalan beriringan, pemangkasan TKD justru bisa menjadi tonggak lahirnya era baru kemandirian ekonomi daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan. **(* / Arso P Nugroho)**

SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT: Mohammad Iqbal, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma
PEMIMPIN REDAKSI: Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI;
TIM PENULIS ARTIKEL: Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah_senator@dpr.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

Seeking New Independent Way for Regional Fiscal

State Budget Planning of 2026 triggers hot debate in public arena. The focus is none other than the government policy to significantly cutting Fund Transfer to Regions (FTtR) from 864.1 trillion Rupiah to 650 trillion Rupiah next year. The near 25% cut immediately triggers concern, primarily among regions which to date rely heavily on state flow of fund to finance their development.

President Prabowo Subianto affirms that this step is a part of efficiency strategy on government expenditure. The Government considers FTtR hasn't been fully effective in driving equality in prosperity. Instead, the budget will be directed more toward inter-ministries' programs which are directly aimed at communities in the regions. The logic behind the policy is simple: cutting short long bureaucracy and ascertaining the budget truly reaches the beneficiaries.

DPD RI Chairman Sultan B Najamudin tries to view the policy from different angle. He acknowledges the fairly drastic drop of FTtR, yet he emphasizes that more than half of government spending still flows to regions, despite the funnelling is through the state program. In his opinion, the pattern reversely is possible to result in a more measurably productive development, beginning from food security, cooperation, education, up to nutritious free meal programs. Therefore, instead of reduction in conventional transfer, the portion for the regions in the state budget remains significant.

In the same tone, the Vice Chairman of DPD RI, Tamsil Linrung, perceives the policy should in fact be a momentum for regions to strengthen their fiscal independence. Regional administration is challenged to be more innovative in initiating Regional Authentic Income (RAI), including utilizing creative financing instrument such as regional bond. With good management, such instrument does not only generate fresh fund, but it also builds public confidence toward the regional fiscal capacity.

Nonetheless, optimism may never overlook real risks. Without solid accompanying strategy, FTtR could potentially expand the gaps among regions. Regions with weaker economic basis are potentially left behind further away. Therefore, besides funnelling state budget through programs, the state must ascertain the existence of a special formula for vulnerable regions in order that they are not marginalized off the national development wave.

Finally, the policy is a test to all parties. The central administration has to consistently guard the effectiveness of cross-ministries programs, while regional administrations have to enhance their fiscal creativities. The road to fiscal independence is far from being easy, yet when the central and the regional are keen to walk hand in hand, FTtR reduction can in fact turn into a milestone of a birth of regional economic independence new era which is more robust and sustainable
(* / Arso P Nugroho)

RAPBN 2026: DANA TKD KEMBALI DIPANGKAS

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sidang paripurna tersebut dihadiri jajaran pemerintah, Pimpinan DPR, serta Pimpinan dan Anggota DPD RI. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pembahasan RAPBN selalu memantik perhatian publik. Namun kali ini, sorotan tajam mengarah pada kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang menuai pandangan berbeda dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPD RI.

Arso P Nugroho

Penulis

Pemerintah menegaskan, langkah pemangkasan TKD merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo. Menurutnya, belanja TKD selama ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintahan yang saya pimpin mendorong efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tepat sasaran. Ke depan, TKD bukan lagi satu-satunya instrumen pemerataan,” tegas Prabowo di hadapan anggota parlemen.

Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD direncanakan hanya sebesar Rp650 triliun. Angka ini turun signifikan, yakni Rp214,1 triliun atau 24,7 persen, dibandingkan *outlook* 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun. Pemangkasan ini sekaligus menempatkan alokasi TKD 2026 sebagai yang terendah dalam lima tahun terakhir. Padahal, sejak 2021, tren realisasi TKD cenderung meningkat: Rp785,7 triliun pada 2021, Rp816,2 triliun di 2022, Rp881,4 triliun pada 2023, lalu



Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda menyampaikan RAPBN dan Nota Keuangan 2026. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sedikit terkoreksi ke Rp863,5 triliun di 2024, dan diperkirakan Rp864,06 triliun pada 2025.

Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak luas, terutama pada daerah-daerah yang selama ini sangat bergantung pada transfer pusat. Sejumlah Anggota DPD RI menilai pemangkasan ini perlu diiringi formula baru agar pembangunan daerah tidak terhambat. Tanpa strategi yang jelas, kekhawatiran soal meningkatnya kesenjangan antarwilayah bisa menjadi kenyataan. Namun, pemerintah optimistis bahwa penataan ulang belanja pusat dan daerah akan menghasilkan distribusi anggaran yang lebih tepat guna.

Secara keseluruhan, RAPBN 2026 memproyeksikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dengan target pendapatan Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB, yang akan ditopang oleh strategi pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap langkah-langkah efisiensi ini dapat memperkuat pondasi fiskal dan menjaga kredibilitas anggaran negara.

Prabowo bahkan menegaskan ambisinya untuk mencapai APBN tanpa defisit di masa kepengimpinannya. “Saya berjanji di hadapan majelis ini, kita akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini dapat kita tekan sekecil mungkin. Harapan saya, suatu saat, entah 2027 atau 2028, saya bisa berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa Indonesia memiliki APBN tanpa defisit sama sekali,” ujarnya optimistis. (*)

Pemantik Kemandirian Fiskal

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025). Menurut Sultan, RAPBN 2026 menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap upaya peningkatan produktivitas pertanian, penguatan infrastruktur, hilirisasi mineral, perbaikan layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Di sektor pendidikan, Sultan menyoroti alokasi anggaran yang mencapai lebih dari Rp758 triliun, angka terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini menjadi hadiah istimewa bagi dunia pendidikan bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. “Tentunya ini menjadi kado spesial bagi dunia pendidikan Indonesia. Dengan anggaran sebesar itu, kita berharap kualitas SDM meningkat dan kesenjangan akses pendidikan bisa ditekan,” ujar Sultan.

Menyangkut Transfer ke Daerah (TKD), Sultan mengakui adanya penurunan cukup drastis dari Rp919,87 triliun pada 2025 menjadi Rp649,99 triliun pada RAPBN 2026, atau turun sekitar 29,3 persen. Namun, ia menekankan bahwa secara keseluruhan, lebih dari separuh alokasi belanja negara tetap diarahkan untuk pembangunan di daerah, hanya saja tidak seluruhnya melalui skema TKD.

Sultan menjelaskan, pemerintah pusat kini lebih banyak menyalurkan anggaran pembangunan daerah melalui program-program kementerian dan lembaga. Beberapa di antaranya adalah program ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta Makan Ber-



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima RAPBN dan Nota Keuangan 2026 dari Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

gizi Gratis (MBG). “Memang TKD dipangkas, tapi banyak anggaran pusat yang turun ke daerah dalam bentuk program. Skema ini diharapkan lebih produktif dan memberi dampak ekonomi yang signifikan,” jelasnya.

Menurut Sultan, pola ini justru bisa mendorong pemerataan pembangunan melalui pendekatan yang lebih terarah dan berbasis program. Anggaran pusat yang digelontorkan langsung ke daerah diharapkan mampu memberikan hasil nyata, mulai dari penguatan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, meskipun TKD menurun, aliran dana pusat ke daerah tetap terjaga.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menegaskan, penyesuaian alokasi TKD seharusnya menjadi pemantik kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah, kata dia, dituntut untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan asli daerah (PAD). “Kuncinya ada pada inovasi dan efisiensi pengelolaan anggaran, sekaligus menciptakan iklim investasi yang ramah di sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Dengan cara ini, daerah bisa tumbuh mandiri dan tak terlalu bergantung pada transfer pusat,” tegas Sultan. (*)

Porsi APBN ke Daerah Meningkatkan

Theresia Oktavina

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa meskipun pemerintah memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD), porsi APBN yang mengalir ke daerah justru semakin besar. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan implementasi Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai program strategis pemerintah, kata Tamsil, kini menjadi katalisator baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Program-program seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, penguatan koperasi dan UMKM, hingga penyediaan fasilitas kesehatan kini dikurcurkan langsung ke daerah. Tamsil menilai, skema ini membawa manfaat konkret bagi masyarakat di berbagai wilayah. Karena itu, penurunan TKD dalam skema konvensional semestinya disikapi bukan sebagai ancaman, melainkan momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing. “TKD tidak lagi menjadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Tamsil menilai, kebijakan ini justru bisa menjadi stimulan bagi daerah untuk menggali potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat kapasitas fiskalnya melalui instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat. Salah satu opsi yang disarankan-

nya adalah penerbitan obligasi daerah (*municipal bond*) untuk mendanai proyek-proyek bernilai ekonomi tinggi yang berdampak langsung pada masyarakat.

Lebih lanjut, Tamsil menjelaskan bahwa obligasi daerah bukan hanya sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana membangun kepercayaan pasar terhadap pemerintah daerah. Dengan tata kelola yang transparan, instrumen ini dapat menjadi motor pembangunan baru dan menegaskan kemandirian fiskal. Ia mencontohkan potensi komersialisasi jalur utilitas di perkotaan yang dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan baru. Selain itu, daerah juga bisa menggarap potensi pengelolaan aset, kawasan ekonomi, sektor energi, hingga peluang investasi lainnya, selama dibarengi inovasi fiskal dan tata kelola yang sehat.

Tamsil juga mengingatkan bahwa kepala daerah memegang peran sentral dalam merancang kebijakan pembangunan yang berbasis potensi lokal. Menurutnya, program-program strategis tidak hanya lahir dari kebijakan pusat, tetapi juga dari janji politik kepala daerah dan proyeksi arah pembangunan jangka panjang. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan.

“Pembangunan daerah harus digerakkan secara gradual melalui kombinasi kebijakan pusat dan inisiatif lokal. Pengurangan dana transfer konvensional adalah ujian sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensinya. Inisiatif daerah harus bergerak lebih kuat, sementara pusat menyediakan dukungan strategis. Sinergi keduanya akan menentukan seberapa tangguh kita membangun kemandirian fiskal di masa depan,” pungkas Tamsil. (*)



Momentum Pemda Berinovatif

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan baru seiring penurunan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran TKD hanya diproyeksikan sebesar Rp650 triliun, turun 24,7 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun. Bagi banyak daerah, kondisi ini menjadi ujian serius untuk mengatur ulang strategi pembangunan dan sumber pendanaan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, melihat situasi ini sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif. Menurutnya, berkurangnya transfer pusat seharusnya tidak membuat pemda ter-

puruk, melainkan memacu mereka menggali potensi fiskal yang belum tergarap maksimal. “Pengurangan transfer pusat memang memberatkan pemda, tapi justru di sinilah tantangan bagi daerah untuk menggali potensi fiskal secara kreatif dan inovatif,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Irman menegaskan agar pemda tidak mengambil jalan pintas dengan menaikkan pajak atau retribusi yang justru dapat membebani masyarakat kecil. Alternatifnya, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memanfaatkan aset daerah yang belum produktif, memperluas kerja sama investasi, serta membuka peluang pada sektor wisata dan ekonomi kreatif. Dengan langkah ini, pemda dapat memperkuat pendapatan asli daerah tanpa menambah beban rakyat.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam penentuan kebijakan fiskal, terutama jika

pemda hendak menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, setiap keputusan harus melalui diskusi bersama

pemangku kepentingan agar kebijakan tidak menimbulkan keresahan. Kasus kenaikan PBB-P2 yang memicu protes di sejumlah daerah seperti Pati, Cirebon, dan Bone menjadi pelajaran penting. Kebijakan pajak tanpa sosialisasi yang baik dapat menimbulkan gejolak sosial yang sulit dikendalikan.

Selain itu, Irman mengingatkan pemerintah pusat untuk tetap menjaga keadilan fiskal. Ia menilai daerah-daerah yang masih sangat bergantung pada TKD harus mendapat perhatian khusus, terutama karena sektor jasa dan sumber pendapatan asli daerah di wilayah tersebut belum berkembang optimal. Tanpa dukungan yang memadai, pembangunan daerah bisa terhambat dan masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Bagi Irman, penurunan anggaran transfer ke daerah seharusnya dilihat sebagai titik balik untuk membangun kemandirian fiskal. Momentum ini diharapkan memacu inovasi pemda dalam menggali potensi lokal, memanfaatkan peluang ekonomi, dan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta. Sinergi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal akan menjadi kunci keberhasilan daerah dalam menghadapi dinamika fiskal yang semakin kompleks. (*)



Terendah Sepanjang Sejarah

Betria Eriani

Penulis

Polemik seputar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kembali mencuat, terutama terkait dana transfer ke daerah (TKD) yang diproyeksikan hanya sebesar Rp650 triliun. Angka ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK). Menurutnya, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah Indonesia, sebuah kondisi yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di daerah.

Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menyoroti ketimpangan antara besaran APBN dan proporsi dana yang dialirkan ke daerah. Dalam sepuluh tahun terakhir, kata AWK, total APBN meningkat signifikan dari Rp1.864 triliun pada 2016 menjadi Rp3.787 triliun pada 2026. Namun, tren pertumbuhan ini tidak diikuti oleh TKD yang justru mengalami penurunan drastis, dari Rp864 triliun pada 2025 menjadi Rp650 triliun atau hanya setara 17,16 persen dari total APBN. Padahal, sebelumnya, porsi TKD sempat menyentuh angka 38 hingga 40 persen.

Bagi Wakil Ketua Komite II DPD RI itu, penurunan drastis ini patut menjadi perhatian serius Presiden Prabowo



Angelius Wake Kako (AWK). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Subianto. Ia menilai, RAPBN 2026 perlu dievaluasi, khususnya terkait kebijakan TKD yang dianggap terlalu kecil dibanding kebutuhan pembangunan daerah. “Dana transfer ke daerah punya peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kalau transfer terlalu kecil, anggaran menumpuk di pusat dan masyarakat daerah yang paling dirugikan,” tegasnya.

AWK juga mengingatkan pemerintah pusat untuk belajar dari pengalaman sejumlah daerah yang terpaksa mengambil kebijakan kurang populer akibat keterbatasan fiskal. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana pemerintah daerah menaikkan pajak secara signifikan demi menutup celah fiskal yang menyempit. “Kita tidak ingin kepala daerah dipaksa mengorbankan masyarakat dengan kebijakan menaikkan pajak. Jangan sampai hal ini terulang di banyak daerah lain,” ujarnya.

Menurutnya, keberlanjutan pembangunan di daerah

sangat bergantung pada keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Tanpa dukungan anggaran memadai, pemerintah daerah berpotensi kesulitan membiayai pelayanan publik, mengembangkan infrastruktur, hingga meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Jika ini dibiarkan, kesenjangan pembangunan bisa semakin melebar, terutama antara Jawa dan daerah-daerah di luar Jawa yang masih bergantung besar pada TKD.

AWK berharap Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan kembali besaran TKD sebelum RAPBN 2026 dibahas di DPR RI. Menurutnya, langkah revisi bukan hanya penting untuk memastikan keadilan fiskal, tetapi juga menjadi sinyal keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah. “RAPBN ini masih rancangan. Kita berharap Presiden mau mendengar suara daerah agar pembangunan berjalan merata dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud,” pungkaskannya. (*)

Berpotensi Menekan Fiskal Daerah

Helena AF Ojan

Penulis

Rencana pemerintah memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 memunculkan kekhawatiran di berbagai daerah. Salah satu suara yang lantang menyuarakan keresahan datang dari Lia Istifhama, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur. Dalam RAPBN 2026, pemerintah hanya mengusulkan alokasi TKD sebesar Rp650 triliun, turun 24,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp864,1 triliun. Angka ini menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, padahal sebelumnya tren TKD selalu mengalami kenaikan.

Bagi Lia, kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. “Pemangkasan TKD berpotensi menekan fiskal daerah. Pemerintah daerah bisa saja mencari kompensasi dengan menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini tentu membebani masyarakat. Padahal TKD adalah tulang punggung pembangunan dan pelayanan publik, terutama di wilayah yang masih bergantung pada APBN,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).

Kekhawatiran Lia diperkuat dengan kondisi aktual di Jawa Timur. Berdasarkan data Bappeda setempat per 22 Agustus 2025, realisasi TKD baru



mencapai Rp6,2 triliun atau 53,91 persen dari target Rp11,5 triliun. Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan Rp2,9 triliun, baru terealisasi Rp1,5 triliun; Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan Rp4,3 triliun, baru terealisasi Rp2,7 triliun; Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik hanya terealisasi Rp13,7 miliar atau 9,15 persen dari target Rp150 miliar; DAK nonfisik baru mencapai Rp1,9 triliun dari target Rp4 triliun. Sementara Dana Insentif Daerah (DID) juga belum maksimal, baru terealisasi Rp12,6 miliar atau 50 persen dari target Rp25,3 miliar.

Situasi ini menjadi ironis mengingat Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, terutama dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Lia menilai pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang berkontribusi besar terhadap kas negara. “Sudah selayaknya pemerintah pusat memberi keadilan fiskal kepada daerah penyumbang terbesar penerimaan negara. Dengan begitu, ekonomi daerah lebih bergairah dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.

Lebih jauh, Lia menyoroti pentingnya prinsip otonomi daerah yang berkeadilan. Menurutnya, pembangunan yang merata hanya bisa tercapai jika alokasi TKD didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi daerah. Jika pemerintah pusat tidak memberikan porsi yang seimbang, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah penyumbang besar dan daerah penerima manfaat.

Di tengah tantangan pemangkasan anggaran, Lia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPD RI agar kebijakan fiskal yang diambil tidak justru menekan masyarakat. Ia berharap ruang revisi terhadap alokasi TKD masih terbuka agar daerah seperti Jawa Timur tidak kehilangan daya dorong ekonominya. “Kalau kebijakan ini tak disesuaikan, dampaknya akan terasa langsung pada layanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Pemda Berharap TKD Ditingkatkan

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Pemerintah daerah di berbagai provinsi menyuarkan harapan agar dana transfer ke daerah (TKD) tidak kembali mengalami pemangkasan seperti pada APBN 2025. Bahkan, jika memungkinkan, alokasinya bisa ditingkatkan demi menjaga kelanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini diungkapkan Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi, saat memimpin kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, Senin (25/8/2025).

“Tadi banyak aspirasi dari pemerintah daerah yang mengharapkan dana transfer ke daerah itu tidak turun, malah kalau bisa naik. Sebab program-program prioritas pemerintah pusat harus tetap sejalan dengan program yang sudah direncanakan pemerintah daerah,” ujar Ahmad. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi pemda sekaligus menginventarisasi masukan untuk penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

Dalam pertemuan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Ahmad Nawardi menegaskan bahwa salah



Komite IV DPD RI saat melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Utara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

satu fokus utama pembahasan adalah kebijakan TKD. Pasalnya, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 diproyeksikan turun drastis dari Rp919 triliun menjadi Rp650 triliun. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan yang sudah direncanakan.

Senator dari Sulawesi Utara, Maya Rumantir, yang turut hadir dalam pertemuan itu, menekankan pentingnya perhatian lebih untuk wilayahnya dalam penyusunan APBN 2026. “Daerah kita punya potensi besar, mulai dari sektor kelautan, pariwisata, hingga energi. Semua ini harus masuk dalam prioritas agar pembangunan di Sulut semakin merata dan berkelanjutan,” ujarnya. Maya berharap potensi daerah dapat dioptimalkan dengan dukungan anggaran yang memadai dari pusat.

Sementara itu, Gubernur

Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Komite IV DPD RI. Menurutnya, DPD RI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Kami berterima kasih kepada Komite IV DPD RI. Banyak hal yang telah kami sampaikan terkait RAPBN 2026. Apapun keputusan pusat, kami tetap loyal, tetapi juga akan mengantisipasi langkah-langkah strategis apabila itu harus dilaksanakan,” katanya.

Melalui kunjungan ini, Komite IV DPD RI berkomitmen menyampaikan aspirasi pemda agar kebijakan TKD dalam APBN 2026 dapat mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah. Dengan dukungan dana yang memadai, diharapkan pemerintah daerah mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. (*)

Danais DIY Dipangkas Separuh

Adhi Nugroho

Penulis

Alokasi Dana Keistimewaan (Danais) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2026 mengalami pemangkasan signifikan. Pemerintah pusat memutuskan untuk menurunkan Danais dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar. Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DIY, RA Yashinta Sekarwangi Mega, menyatakan sikapnya senada dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menghormati keputusan pemerintah pusat.

“Saya mengamini pernyataan Ngarsa Dalem (Sri Sultan) yang menghormati pemotongan Danais tahun 2026 oleh pemerintah pusat. Keistimewaan Yogyakarta juga jangan diukur hanya dari besar kecil Danais karena dahulu Sinuwun Sri Sultan HB IX dan keluarga Kraton membantu Republik Indonesia dengan penuh ketulusan. Justru ketulusan itu yang membuat Jogja istimewa di mata Republik,” ujar Yashinta, Senin (25/8/2025).

Yashinta yang juga Anggota Komite IV DPD RI mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui rencana pemotongan Danais sejak awal. Menurutnya, informasi tersebut sudah



Anggota DPD RI Yashinta Sekarwangi Mega. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tercantum dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. “Iya, saya sudah mengetahui pemotongan Danais ketika RAPBN diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Komite IV DPD RI untuk ditinjau bersama,” jelasnya.

Meski begitu, Yashinta meyakini Pemerintah Daerah DIY mampu mengatasi dampak pemotongan Danais tersebut. Ia memahami keputusan pemerintah pusat dilakukan karena kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih. Program-program pembangunan yang sekiranya bisa ditunda, menurutnya, akan disesuaikan terlebih dahulu agar kebijakan ini tidak terlalu membebani anggaran.

Lebih lanjut, Yashinta mengajak semua pihak untuk memandang keputusan

pemotongan Danais ini dari sisi positif. Baginya, Yogyakarta tetap istimewa bukan karena besarnya alokasi dana, melainkan ketulusan daerah tersebut dalam mendukung pemerintah pusat dalam berbagai kondisi.

“Ini menjadi momen yang tepat bagi Yogyakarta untuk semakin membuktikan keistimewaannya lewat ketulusan membantu pemerintah pusat dalam segala kondisi,” ungkapnya.

Menurut Yashinta, sikap legawa dan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Meskipun Danais DIY dipangkas separuh, Yashinta optimistis Yogyakarta akan terus mampu menjaga identitas keistimewaannya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. (*)

Dana Otsus Papua Tak Kena Efisiensi

Lela Sadiyah

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma, mengapresiasi langkah pemerintah yang memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak termasuk dalam sasaran efisiensi anggaran pada tahun 2026. Filep menilai keputusan ini tepat sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan dan kekhususan Papua yang masih sangat bergantung pada dana Otsus.

“Selaku pimpinan Komite III DPD RI dan wakil Papua Barat, saya mengapresiasi keputusan pemerintah yang memastikan dana Otsus tak kena efisiensi tahun depan. Keputusan ini menjawab aspirasi masyarakat yang kami suarkan pada Rapat Paripurna DPD RI Maret lalu. Kami menilai, ini keputusan yang responsif atas masukan, kritik, dan aspirasi kami selaku senator dan masyarakat di daerah,” ujar Filep dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).

Dalam berbagai kesempatan, Filep kerap menegaskan pentingnya mempertahankan alokasi dana Otsus tanpa pemotongan. Menurutnya, provinsi-provinsi di Tanah Papua masih memiliki ketergantungan tinggi



Anggota DPD RI Filep Wamafma. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

terhadap dana ini, terutama karena dana Otsus menjadi salah satu sumber utama penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemotongan dana, kata Filep, justru akan menghambat pembangunan dan pelayanan publik di Papua.

Filep juga mendukung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menegaskan bahwa pemerintah pada tahun depan akan memaksimalkan penyerapan dana Otsus, bukan memangkasnya. Pemerintah berkomitmen memperbaiki realisasi penyerapan agar manfaat dana tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.

“Kami mendukung langkah ini, mari kita evaluasi bersama, merespons kendala-kendala yang terjadi di lapangan, termasuk jika

ada penyelewengan, harus ditindak tegas. Sebagai mitra pemerintah, DPD RI konsisten dan berkomitmen mengawal serta mengawasi implementasi Otsus sesuai peruntukannya, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Filep.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa dana Otsus untuk Papua dan Aceh tidak akan masuk dalam daftar efisiensi pada RAPBN 2026. Dalam rancangan anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp13,14 triliun untuk kedua provinsi, turun dibandingkan alokasi tahun ini sebesar Rp17,52 triliun. Namun, fokus utama pemerintah adalah meningkatkan efektivitas dan penyerapan dana agar pembangunan di Papua berjalan optimal. (*)

Gubernur Maluku Minta Pemerintah Pusat Tak Lagi Potong Anggaran Daerah

Rini Sumarni

Penulis

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi melakukan pemotongan anggaran daerah. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/8/2025), yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta.

Dalam pertemuan tersebut, Lewerissa memaparkan sejumlah persoalan fundamental yang dihadapi Provinsi Maluku, mulai dari regulasi sektor perikanan, pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga beban fiskal akibat pembayaran utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Selain itu, ia juga mengusulkan tambahan anggaran untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Gubernur menyoroti ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang membatasi



Komite IV DPD RI pada agenda kunjungan kerja di Maluku Utara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kewenangan daerah dalam menarik retribusi perikanan di bawah 12 mil laut. Menurutnya, sebagai salah satu penghasil sumber daya perikanan terbesar nasional, Maluku seharusnya memperoleh pembagian PNBP yang lebih adil dan proporsional.

Terkait pembayaran utang kepada PT SMI, Lewerissa meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran fiskal. Ia menegaskan komitmennya melunasi kewajiban tersebut hingga 2027, namun berharap tidak ada lagi pemotongan anggaran setiap tahunnya. "Setiap tahun harus potong sekitar Rp100 miliar lebih. Jangan lagi dipotong, beri kelonggaran. Kami pastikan 2027 lunas," pintanya.

Lewerissa juga menekankan pentingnya tambahan anggaran untuk membayar gaji PPPK, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia berharap DPD RI dapat menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi Maluku kepada pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menegaskan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi Maluku. "Insyaallah, semua yang disampaikan Pak Gubernur akan diprioritaskan dalam agenda rapat DPD RI bersama kementerian dan lembaga terkait di Jakarta. Kita ingin melihat kemajuan Maluku," ujar Tamsil. (*)

Pemangkasan TKD Hambat Program Prioritas Daerah

Arso P Nugroho

Penulis

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling mengungkapkan kekawatirannya atas tantangan fiskal yang semakin berat akibat berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2025. Kondisi tersebut membuat sejumlah program pembangunan strategis di bidang pekerjaan umum, perikanan, dan infrastruktur jalan terpaksa ditunda atau diperlambat.

“Apabila tren penurunan transfer ini berlanjut pada RAPBN 2026, maka banyak agenda prioritas daerah akan terhambat, mulai dari peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan industri pengolahan hasil laut, hingga penguatan program ketahanan pangan,” kata Yulius dalam pertemuan dengan Komite IV DPD RI di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (25/8/2025).

Kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Sulut dilakukan untuk menginventarisasi materi penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan



Anggota DPD RI Maya Rumantir bersama Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling dan Wagub Sulut Victor Mailangkay. (Foto Istimewa)

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan ini dihadiri Pimpinan dan Anggota Komite IV bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulut.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Menurutnya, meskipun RAPBN 2026 dirancang lebih ekspansif dari sisi belanja negara, alokasi dana transfer ke daerah (TKD) justru mengalami penurunan signifikan, dari Rp919,9 triliun atau 25 persen belanja pada APBN 2025 menjadi sekitar Rp650 triliun atau 17,2 persen pada RAPBN

2026.

Penurunan TKD ini, lanjut Ahmad, berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah, khususnya bagi provinsi dengan kapasitas fiskal rendah seperti Sulut, yang sebagian besar program pembangunannya masih bergantung pada dukungan anggaran transfer dari pemerintah pusat.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sulut, Maya Rumantir, juga menyoroti dampak penurunan proyeksi TKD terhadap pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut bisa menghambat realisasi program prioritas daerah dan memperlambat pemerataan pembangunan di Sulawesi Utara. (*)

Terbitkan Obligasi untuk Kemandirian Fiskal Daerah

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa perubahan arsitektur fiskal negara yang selaras dengan visi Asta Cita pemerintah harus mendorong daerah menjadi lebih mandiri. Menurutnya, ketergantungan pada dana transfer ke daerah (TKD) sudah tidak lagi relevan di tengah terbukanya peluang pembiayaan alternatif. Salah satu langkah strategis yang ia dorong adalah penerbitan obligasi daerah atau *municipal bond* sebagai stimulus kemandirian fiskal.

“Hingga saat ini penerbitan municipal bond nyaris tidak terdengar. Karena ada kesan pemerintah tidak serius mendorong, daerah pun tidak berani melakukan terobosan,” kata Tamsil dalam diskusi tematik bertajuk “Membaca Arah Arsitektur Anggaran Negara untuk Pembangunan Daerah dalam Bingkai Asta Cita” yang digelar DPD RI bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, Jumat (22/8/2025).

Tamsil menilai, pemerintah perlu menyiapkan paket insentif khusus bagi daerah yang berani menerbitkan obligasi. Bahkan, pemerintah pusat bisa bertindak sebagai penjamin agar tingkat kepercayaan publik dan investor meningkat. Menurutnya, kebijakan ini dapat membuka jalan menuju kemandirian fiskal dan mengurangi beban ketergantungan pada TKD yang terus menurun.

Potensi dana publik yang dapat diserap melalui instrumen ini dinilai sangat besar. Tamsil menyebut sumbernya bisa berasal dari sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji, dengan jumlah



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dalam diskusi tematik bertajuk “Membaca Arah Arsitektur Anggaran Negara untuk Pembangunan Daerah dalam Bingkai Asta Cita”, Makassar, Sulsel. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

mencapai ribuan triliun rupiah. “Dana itu siap membiayai proyek-proyek strategis daerah, seperti sektor energi, pariwisata, air bersih, utilitas bawah tanah, hingga pembangunan rumah sakit daerah. Tinggal bagaimana kita berani menjemput bola,” ujarnya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI, Muhammad Syafi'i Basalamah, turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Asta Cita. Menurutnya, pelaksanaan delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto hanya akan berjalan optimal jika pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dan strategi pembiayaan yang jelas.

“Untuk memperkuat sinergitas, dibutuhkan penyelarasan pemahaman antara pusat dan daerah. Karena itu, kami merekomendasikan adanya panduan komprehensif berupa cetak biru transformasi daerah berbasis Asta Cita. Dengan panduan ini, kepala daerah akan lebih mudah mengimplementasikan visi Asta Cita sekaligus memaksimalkan efek pengganda ekonomi dari setiap program pembangunan,” jelas Syafi'i. (*)

AKSI DEMO BERBUNTUT ANARKIS

Adhi Nugroho

Penulis

Suasana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia, yang berbuntut pada tindakan anarkis, penjarahan, dan menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini membuat kalangan senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasa prihatin.

Awalnya, aksi ini terjadi pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI dengan tuntutan pembubaran DPR RI. Ajakan untuk melakukan aksi ini berseleweran di media sosial dan pesertanya kebanyakan berasal dari kalangan pelajar. Tiga hari kemudian, pada tanggal 28 Agustus 2025, Partai Buruh melakukan demo di tempat yang sama. Tuntutan yang mereka sampaikan adalah penghapusan sistem *outsourcing*, penolakan kebijakan upah murah, dan kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

Massa Partai Buruh ini sudah membubarkan diri sejak siang hari. Namun, menjelang sore, muncul lagi massa lainnya. Aksi ini terus berlanjut sam-



Suasana pembubaran masa aksi demo di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (25/8/2025). (Foto Tempo)

pai malam hari. Aparat kepolisian terus berusaha membubarkan massa. Dalam upaya membubarkan massa, petugas kepolisian menggunakan kendaraan taktis (rantis) Brimob dan sempat melindas seorang pengemudi ojek *online* (ojol) hingga tewas, yaitu Affan Kurniawan.

Tewasnya Affan Kurniawan menjadi pemantik terjadinya aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Sasaran mereka dalam melakukan aksi adalah kantor DPRD dan kepolisian. Sejumlah gedung DPRD dibakar massa, seperti Gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah gedung DPRD kabupaten dan kota di Jawa.

Massa juga melakukan

perusakan dan membakar kantor serta fasilitas milik polisi di berbagai daerah. Di Jakarta saja, misalnya, massa membakar kantor Polresta Jakarta, sejumlah polsek, polsubsektor, dan pos polisi lalu lintas. Perusakan kantor polisi juga terjadi di daerah lain, seperti di Kediri, Jawa Timur, NTB, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya.

Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan tindak kekerasan dan bahkan penjarahan itu membuat kalangan senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasa prihatin. Mereka mengimbau masyarakat di daerah pemilihannya untuk tidak melakukan demo dengan tindakan anarkis dan perusakan. (*)

Tanggung Jawab Bersama Mengendalikan Aksi Demo

Lela Sadiyah

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, mengingatkan bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk mengendalikan situasi di tengah gelombang aksi unjuk rasa. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga kondisi tanah air tetap aman dan kondusif guna mendukung terciptanya pembangunan.

“Kita semua punya tugas untuk menjaga tanggung jawab masing-masing dalam mengendalikan situasi. Untuk saling memberikan perspektif positif kepada seluruh masyarakat, anggota keluarga, lingkungan, dan komunitas, agar negara ini bisa dibangun dalam kondisi yang baik dan aman,” kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Sultan turut menyampaikan rasa duka cita atas insiden meninggalnya pengemudi ojek *online* (ojol), Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pembubaran aksi unjuk rasa pada Kamis (28/8/2025) malam. “Kami menyampaikan duka cita dan belasungkawa terkait masyarakat kita yang ter-



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan keterangan pers terkait aksi demo. (Foto Antara)

“**Kami menyampaikan duka cita dan belasungkawa terkait masyarakat kita yang terdampak peristiwa kemarin.**”

**Ketua DPD RI,
Sultan B Najamudin**

dampak peristiwa kemarin,” ucap Sultan. Ia juga berharap peristiwa memilukan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

Seperti diketahui, demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI berakhir ricuh pada Kamis (28/8) malam. Kericuhan meluas ke berbagai wilayah di sekitar kompleks parlemen, mulai dari Palmerah, Senayan, hingga

Pejompongan.

Dalam kerusuhan tersebut, seorang pengemudi ojol terlindas kendaraan taktis Brimob di wilayah Pejompongan. Kendaraan tersebut kemudian memacu kecepatan dan meninggalkan lokasi setelah kejadian. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Sebanyak tujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya diperiksa terkait insiden tersebut. Bahkan, Komisaris Polisi (Kopol) Cosmas Kaju Gae selaku komandan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sementara itu, Briпка Rohmat yang mengemudikan rantis dijatuhi sanksi demosi selama tujuh tahun. (*)

Tindakan Represif Tidak Dibenarkan

Rini Sumarni

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Penrad Siagian, mengemukakan keras tindakan aparat keamanan yang dinilai represif dalam menangani aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Ia menegaskan bahwa tindakan represif tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi. Aparat keamanan, menurutnya, seharusnya melindungi warga negara, bukan malah membahayakan jiwa mereka.

“Saya meminta Kapolri bertanggung jawab atas insiden tragis yang merenggut nyawa seorang pengemudi ojek *online* (ojol) itu. Kapolri harus menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap setiap tindakan anggotanya, terlebih ketika tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil,” tegas Penrad, Jumat (29/8/2025).

Selain korban jiwa, Penrad juga menyoroti terjadinya penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan terhadap ratusan warga. Ia menyebut banyak pelanggaran serius

hak asasi manusia dalam aksi di berbagai daerah. Di Jakarta, massa aksi yang mayoritas pelajar di bawah umur di-buru, diculik, dan dikeroyok sebelum dibawa ke kantor polisi tanpa pendampingan hukum.

Di Pontianak, 15 orang ditangkap, termasuk tiga anak yang ditangkap secara paksa dengan kekerasan, lalu dipaksa menjalani penggeledahan tanpa dasar hukum. Di Medan, 44 orang ditangkap dengan perlakuan kejam, mulai dari pemukulan, injakan di wajah, hingga pemaksaan membuka pakaian saat ditahan. “Ini jelas sudah keluar dari prinsip negara hukum dan merampas hak konstitusional rakyat untuk

menyampaikan pendapat secara damai,” tegasnya.

Penrad menegaskan bahwa aparat kepolisian seharusnya menjadikan hukum nasional sebagai pegangan utama dalam mengamankan aksi. Hukum telah mengatur bahwa setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Senator asal Sumatra Utara itu menambahkan, tragedi meninggalnya seorang warga sipil saat demonstrasi menjadi peringatan keras agar negara tidak lagi menutup mata. “Keadilan harus ditegakkan, dan seluruh anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keselamatan warga negara. Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses secara adil,” tegas Penrad. Ia juga mendesak Presiden RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepolisian serta memastikan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa ini. (*)



Anggota DPD RI Penrad Siagian
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sampaikan Aspirasi Dalam Semangat Solidaritas Damai

Helena AF Ojan

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustin Teras Narang, menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus dihargai sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang demokrasi. Namun, ia juga mengingatkan agar semua pihak bersikap bijaksana dan mencegah terjadinya provokasi maupun tindakan anarkis yang dapat merugikan kedamaian dan ketenteraman masyarakat luas.

“Gerakan penyampaian aspirasi publik kiranya digelar dalam semangat solidaritas damai dan demi kepentingan yang lebih besar, yakni Indonesia maju. Saya juga minta agar keamanannya dijamin oleh pihak penanggung jawab keamanan,” kata Teras Narang saat menghadiri kegiatan Pumpung Hai Borneo di Palangkaraya, Sabtu (30/8/2025).

Teras Narang mengajak seluruh elemen masyarakat daerah, khususnya di daerah pemilihannya, untuk menjaga situasi yang damai dan sejahtera demi kepentingan bersama. “Pemerintah daerah dan wakil rakyat, dalam semangat Huma Betang bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk mahasiswa, diharapkan meningkatkan koordi-



Anggota DPD-RI dapil Kalteng, Agustin Teras Narang (depan kanan) saat menghadiri kegiatan Pumpung Hai Borneo di Palangka Raya. (Foto Istimewa)

nasi dan membangun simpul damai. Pihak berwajib juga diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik terkait penyelesaian kesalahpahaman serta dampak yang terjadi akibat aksi demonstrasi yang kemarin sempat terjadi di Palangkaraya,” ucapnya.

Sementara itu, Senator dari Kalimantan Utara, Hasan Basri, mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi di tengah meluasnya aksi unjuk rasa di Indonesia. Meskipun menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional, ia menegaskan bahwa aksi tersebut harus berlangsung damai dan tidak berujung anarkis. “Saya memahami aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun, jangan sampai aksi yang seharusnya damai malah berubah menjadi kerusuhan,” ujar Hasan Basri dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Hasan Basri menegaskan,

tindakan anarkis hanya akan memperburuk situasi dan merugikan masyarakat luas. Ia mencontohkan, kerusuhan dapat merusak fasilitas umum, menghambat aktivitas ekonomi, serta mengganggu transportasi dan mata pencaharian warga. “Yang paling dirugikan itu adalah masyarakat. Pedagang tidak bisa berjualan, transportasi terganggu, bahkan pekerja sulit pulang. Untuk itu, saya minta semua pihak menahan diri,” tegasnya.

Kepada aparat keamanan, Hasan Basri juga meminta agar tidak bertindak represif dalam menghadapi unjuk rasa. Ia mengimbau aparat memperlakukan massa aksi secara humanis. “Massa pendemo adalah saudara kita sebangsa, anak-anak kita. Jangan sampai ada yang terluka, apalagi meninggal dunia,” katanya sembari menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan. (*)

Harus Jadi Pelajaran Bersama

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Gelombang demonstrasi besar-besaran yang merebak pada akhir Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah mengundang keprihatinan mendalam bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muhammad Nuh. Pasalnya, unjuk rasa tersebut berujung ricuh dan meluas hingga menimbulkan kerusakan, penjarahan, pembakaran fasilitas publik, bahkan korban jiwa.

Oleh sebab itu, senator dari daerah pemilihan Sumatera Utara ini mengajak semua pihak menjadikan peristiwa nasional tersebut sebagai pelajaran berharga agar berbagai tindakan destruktif dan eksekusi negatif dari unjuk rasa tidak kembali terulang. “Tentu saja semua pihak harus mengambil pelajaran dari peristiwa ini,” ujar Nuh dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).

Muhammad Nuh menekankan, peristiwa tersebut harus menjadi evaluasi bagi pemerintah. Pemerintah, menurutnya, perlu cepat dan tanggap merespons berbagai permasalahan serta tuntutan yang muncul dari masyarakat. Misalnya, terkait ketidakadilan ekonomi yang kerap men-



Anggota DPD RI Muhammad Nuh. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

jadi pemicu unjuk rasa. “Banyak analisis menyebutkan bahwa aksi-aksi ini dipicu oleh kesenjangan dan ketimpangan ekonomi. Kebijakan pro-rakyat yang disuarakan presiden mestinya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata di lapangan,” jelasnya.

Selain pemerintah, wakil rakyat juga menjadi sorotan tajam dalam gelombang unjuk rasa ini. Muhammad Nuh mengingatkan agar para pejabat memiliki sensitivitas sosial yang tinggi dan tidak mempertontonkan kemewahan di tengah kesulitan hidup masyarakat. “Hindari pernyataan yang bisa menyinggung perasaan publik. Gunakan bahasa yang santun, jangan terkesan memprovokasi, apalagi merendahkan pihak-pihak lain,” tegasnya.

Nuh juga menyoroti indikasi adanya kekerasan

dan tindakan represif aparat keamanan saat mengamankan unjuk rasa. Ia mendorong petugas, khususnya kepolisian, untuk lebih humanis dalam menjalankan tugas dan terus dilatih agar mengedepankan pendekatan komunikatif.

Tak hanya itu, Muhammad Nuh mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi dan tuntutan dengan cara-cara yang baik dan bijak. “Masyarakat juga harus diingatkan. Walaupun marah dan ingin menyampaikan aspirasi, jangan sampai merusak, apalagi menjarah. Ini juga tantangan bagi para tokoh masyarakat, para dai, dan pihak-pihak terkait untuk terus memberikan edukasi bahwa tindakan merusak dan mengganggu ketertib- an bukanlah hal yang baik,” tandasnya. (*)

Semua Harus Ambil Hikmahnya



Gedung DPRD NTB dibakar massa unjuk rasa. (Foto Detikcom)

Adhi Nugroho

Penulis

Aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025 juga terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan pengemudi ojek *online* (ojol) bergerak dari Polda NTB menuju Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Mataram. Mereka menuntut keadilan atas meninggalnya seorang pengemudi ojol yang tewas terlindas mobil rantis Brimob saat aksi di Jakarta.

Namun, unjuk rasa tersebut berujung ricuh. Massa merusak gerbang Polda NTB, lalu bergeser ke Kantor DPRD NTB. Di depan gedung DPRD, situasi kian memanas. Massa membakar pos penjagaan, merusak fasilitas, dan melempari gedung dengan benda keras. Api akhirnya berko-

bar dan melalap sebagian besar gedung DPRD NTB, termasuk ruang lobi dan lantai dua.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Evi Apita Maya, yang saat kejadian tengah melakukan kunjungan kerja di dapilnya itu, mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. “Apapun yang terjadi, kita minta kepada semua pihak untuk tetap berkepala dingin dan bersabar,” ujar Evi, Sabtu (30/8/2025).

Evi menyesalkan terjadinya kerusakan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas umum. Menurutnya, penyelesaian masalah seharusnya dilakukan melalui dialog, bukan dengan tindakan anarkis. “Seharusnya kita bisa merenung, apa manfaat dari kerusakan dan penjarahan? Setiap per-

soalan bisa diselesaikan baik-baik, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan ke-tegangan,” tegasnya.

Meski demikian, Evi mengajak semua pihak mengambil hikmah dari kejadian tersebut. “Tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini sudah terjadi, mari kita ambil hikmahnya. Semoga hal ini tidak terulang dan negara kita ke depan makin baik, masyarakatnya makin sejuk, serta pemerintahnya makin dekat dan peka terhadap persoalan rakyat,” kata Evi.

Senada dengan Evi, senator asal Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, juga mengimbau warga Maluku untuk tidak terprovokasi dengan aksi unjuk rasa di daerah lain. Ia menegaskan, Maluku punya pengalaman pahit di masa lalu yang harus dijadikan pelajaran. “Ini momentum penting bagi pimpinan agama untuk mengimbau umatnya menahan diri dan tidak terprovokasi situasi politik nasional. Kita sebagai bangsa pernah mengalami hal serupa,” ujarnya usai menghadiri pertemuan dengan pimpinan umat beragama di kantor Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Sabtu (30/8/2025). (*)

Haji Uma Puji Polda Aceh Tangani Aksi Unjuk Rasa

Betria Eriani

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Uma, memberikan apresiasi kepada Kapolda Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah dan jajarannya atas langkah humanis dalam mengendalikan situasi aksi unjuk rasa di Aceh. Menurutnya, pendekatan persuasif yang dilakukan Polda Aceh berhasil menjaga keamanan sekaligus menghadirkan iklim demokrasi yang sehat.

“Ini langkah luar biasa dan terobosan inovatif dari Polda Aceh dalam merangkul masyarakat, berkolaborasi dengan pendemo, sehingga tidak terjadi hal-hal anarkis maupun kerusakan fasilitas umum. Ini patut menjadi contoh,” kata Haji Uma saat audiensi dengan Brigjen Pol Marzuki di Mapolda Aceh, Rabu (3/9/2025).

Haji Uma menilai, pendekatan humanis menjadi kunci keberhasilan dalam mengawal aksi unjuk rasa. Salah satu contohnya adalah perlakuan terhadap komunitas Sahabat Ojol yang awalnya berniat melakukan aksi. Alih-alih memanas, situasi justru mencair karena Polda Aceh memberi-



Anggota DPD RI Sudirman bersama Kapolda Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah. (Foto Polda Aceh)

kan bantuan beras kepada mereka. Tindakan sederhana itu, menurutnya, berdampak besar dalam membangun kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat.

“Polisi bukan hanya penegak hukum, tapi juga pengayom, pelindung, dan sahabat masyarakat. Pendekatan seperti ini bisa menjadi motivasi bagi semua pihak, bahwa merangkul masyarakat harus mengedepankan naluri, perasaan, dan rasa kemanusiaan,” tegas Haji Uma.

Sementara itu, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, berharap Polda Jawa Timur (Jatim) juga mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal aksi demonstrasi di wilayahnya. Menurutnya, kepolisian perlu

memastikan perlindungan terhadap semua peserta aksi, termasuk anak-anak dan pemuda.

“Saya berharap semua peserta aksi, baik orang dewasa maupun anak-anak, mendapat perlakuan yang baik. Kepolisian harus selalu mengedepankan pendekatan humanis,” ujar Lia di Surabaya, Selasa (2/9/2025).

Lia menambahkan, anak-anak dan remaja yang ikut aksi merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Pendekatan represif justru berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi generasi muda. “Mereka adalah generasi penerus bangsa, jadi harus dilindungi dan diarahkan dengan bijak,” tandasnya. (*)

SULTAN TERIMA BINTANG RI UTAMA



Presiden Prabowo Subianto memasangkan tanda penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Theresia Oktavina

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Tanda kehormatan itu diberikan atas jasa Sultan di bidang politik dan kepemudaan, khususnya melalui advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah, serta kontribusinya di lembaga legislatif yang mendorong partisipasi generasi muda dan memperkuat pembangunan daerah.

Sultan menegaskan bahwa Bintang RI Utama bukan semata bentuk apresiasi negara terhadap dirinya, melainkan juga pengakuan terhadap peran DPD RI sebagai representasi daerah. Sultan menilai peran DPD RI semakin penting di tengah kebutuhan memper-

“**Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh anggota DPD RI, rakyat di daerah, dan juga kaum muda yang menjadi tulang punggung negara ini. Penghargaan ini menunjukkan DPD RI sebagai rumah aspirasi daerah, rakyat, dan kaum muda yang menjadi bagian dari arus besar pembangunan nasional.**”

**Ketua DPD RI,
Sultan B Najamudin**

cepat pemerataan pembangunan. Ia menekankan bahwa kebijakan nasional harus berpijak pada realitas di daerah agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar.

“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh anggota DPD RI, rakyat di daerah, dan juga kaum muda yang menjadi

tulang punggung negara ini. Penghargaan ini menunjukkan DPD RI sebagai rumah aspirasi daerah, rakyat, dan kaum muda yang menjadi bagian dari arus besar pembangunan nasional,” ujar Sultan dalam keterangannya usai menerima penghargaan.

Sultan juga menegaskan komitmen DPD RI untuk mengawal Asta Cita Presiden Prabowo, delapan program prioritas pembangunan nasional. Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini, agenda besar tersebut hanya akan berhasil bila melibatkan daerah secara aktif dalam perencanaan maupun implementasi.

“DPD RI siap mengawal pelaksanaan Asta Cita agar benar-benar menyentuh kepentingan rakyat di daerah. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Aspirasi dari pelosok harus hadir dalam perumusan kebijakan pusat. Dengan begitu, pembangunan benar-benar merata hingga ke desa-desa,” kata Sultan.

Sultan juga mendedikasikan penghargaan yang diterimanya itu untuk anak-anak muda Indonesia. Ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses politik dan ekonomi. Sultan berkomitmen memperkuat partisipasi pemuda untuk menggelorakan legitimasi demokrasi sekaligus mempercepat transformasi sosial-ekonomi daerah. Pemuda, katanya, harus berani tampil di ruang politik dan ekonomi. (*)

DPD RI Perkuat Peran Strategis sebagai Jembatan Pusat dan Daerah



Kegiatan focus group discussion bertema “Penguatan Peran DPD RI sebagai Penghubung Pusat-Daerah melalui Optimalisasi Dukungan Kelembagaan” di Bogor, Kamis (21/8/2025). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR

Hemas, menegaskan bahwa penguatan peran DPD RI sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan pembangunan nasional berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Peran strategis ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan pemerataan pembangunan, kesenjangan antarwilayah, serta kebutuhan daerah untuk mendapatkan ruang partisipasi yang lebih besar dalam penyusunan kebijakan nasional,” ujar GKR Hemas dalam *Focus Group Discussion (FGD)* bertema

“Penguatan Peran DPD RI sebagai Penghubung Pusat-Daerah melalui Optimalisasi Dukungan Kelembagaan” di Bogor, Kamis (21/8/2025).

GKR Hemas menilai apresiasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI harus menjadi dorongan moral sekaligus pengingat bahwa kerja keras, komitmen, dan sinergi nyata dibutuhkan dalam perjuangan DPD RI menyejahterakan rakyat. “Beliau menegaskan bahwa DPD RI telah menunjukkan kontribusi nyata melalui penetapan lebih dari 50 keputusan kelembagaan, serta dinilai berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan mendorong kemajuan bangsa,” ucap GKR Hemas.

DPD RI, lanjutnya, bukan sekadar lembaga seremo-

nial, melainkan representasi daerah yang memiliki mandat konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, peran tersebut harus diwujudkan melalui gagasan, rekomendasi, dan solusi konkret yang diperkuat dengan dukungan kelembagaan yang solid.

“Memperjuangkan daerah harus menjadi prioritas utama. Itu yang wajib dilakukan setiap anggota DPD RI. DPD RI merupakan lembaga dari daerah untuk Indonesia. Peran itu tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk staf anggota yang menjadi garda terdepan dalam penyediaan kajian, analisis, serta pendampingan teknis bagi anggota DPD RI,” imbuhnya.

GKR Hemas menambahkan, pelaksanaan tugas konstitusional anggota DPD RI sebagai wakil daerah memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat dari berbagai pihak, salah satunya melalui peran staf anggota. Menurutnya, staf memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat kapasitas lembaga, tidak hanya melalui fungsi teknis, tetapi juga dalam membangun komunikasi publik dan citra positif DPD RI di mata masyarakat. (*)

MBG Memotivasi Anak ke Sekolah

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

RI, Tamsil Linrung, melakukan rangkaian kunjungan kerja di Kota Ambon, Maluku, dalam rangka memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (26/8/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sekaligus upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Didampingi Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, dan senator NTB, Evi Apita Maya, Tamsil mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Cendekia Maluku serta SPPG Hative Besar untuk menyaksikan langsung proses produksi makanan program MBG.

Selain itu, Tamsil juga melakukan peninjauan di sekolah-sekolah penerima manfaat dan berinteraksi langsung dengan siswa-siswi SMP Negeri 15 Ambon serta SD Cendekia Ambon.



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung bersama anggota DPD RI Novita Anakotta, dan Evi Apita Maya meninjau program MBG di Kota Ambon, Maluku. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Suasana ceria tampak ketika para siswa menyambut hangat kedatangan rombongan. Saat ditanya mengenai rasa makanan yang disajikan melalui program MBG, A.R. Bugis, salah seorang siswa, mengatakan makanannya enak dan berharap program ini terus berlanjut.

Tamsil menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga membawa semangat dan keceriaan bagi anak-anak. “Kita sama-sama saksi, anak-anak gembira dan semakin termotivasi ke sekolah karena adanya MBG. Program ini juga turut meningkatkan angka kehadiran siswa di sekolah,” ujarnya.

Tamsil menegaskan bahwa program MBG merupakan pengejawantahan visi besar Presiden Prabowo dalam Asta Cita,

yang menempatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. “Ini adalah implementasi dari skema baru arsitektur kebijakan anggaran negara. Diarahkan ke daerah dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tamsil menekankan bahwa pendekatan baru kebijakan ekonomi yang digagas Presiden Prabowo memberi ruang lebih optimal bagi daerah. Program-program strategis difokuskan pada pembangunan daerah dan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Langkah ini menjadi bagian dari revolusi ekonomi nasional yang bertujuan mendorong kesejahteraan rakyat sekaligus mengikis disparitas antarwilayah. (*)

Penanggulangan Penyakit Cacingan Sejalan dengan Pencegahan *Stunting*

Arso P Nugroho

Penulis

Kasus kematian seorang anak di bawah usia lima tahun (balita) di Sukabumi, Jawa Barat, setelah ditemukan cacing seberat sekitar satu kilogram di tubuhnya, menyita banyak perhatian masyarakat, termasuk Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Erni Daryanti. Kasus tersebut bahkan sempat viral di media sosial.

“Dengan temuan kasus di Sukabumi itu, kita mempertanyakan bagaimana keberlanjutan program penanggulangan cacingan, khususnya terkait *deworming*, yakni pemberian obat secara massal kepada anak usia prasekolah dan sekolah,” kata Senator Erni, yang juga berlatar belakang seorang dokter.

Dalam pandangannya, penanggulangan cacingan harus menjadi program prioritas pemerintah selain pencegahan *stunting*. Menurut Erni, penanggulangan cacingan dan pencegahan *stunting* memiliki keterkaitan erat karena keduanya dapat menghambat pertumbuhan anak yang sehat, cerdas, dan produktif. Penanggulangan cacingan juga mendukung penyerapan gizi yang optimal, sehingga dapat mencegah terjadinya *stunting*.



Anggota DPD RI Erni Daryanti (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“ Dengan temuan kasus di Sukabumi itu, kita mempertanyakan bagaimana keberlanjutan program penanggulangan cacingan, khususnya terkait *deworming*, yakni pemberian obat secara massal kepada anak usia prasekolah dan sekolah. ”

Wakil Ketua
Komite III DPD RI,
Erni Daryanti

Erni menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan. Program ini diberi nama Reduksi Cacingan dan dimulai pada tahun 2019, terutama ditujukan untuk mengatasi infeksi cacing tanah

(*Soil-Transmitted Helminths/STH*) dan filariasis, yang prevalensinya masih cukup tinggi di berbagai provinsi Indonesia.

Target dari program tersebut adalah menurunkan prevalensi cacingan hingga di bawah 10 persen di setiap kabupaten atau kota. Ada tiga langkah utama yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi cacingan, yakni Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) pada anak usia prasekolah dan sekolah, perbaikan kualitas air dan lingkungan yang bersih, serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat.

Erni juga menilai, kasus di Sukabumi menunjukkan bahwa gerakan dan program Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang selama ini dijalankan pemerintah belum cukup efektif untuk mencegah penyakit cacingan. Pasalnya, gerakan PHBS belum secara khusus berfokus pada pemberantasan penyakit ini. (*)

Senator Farabi Soroti Kasus Keracunan MBG

Adhi Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rifki Farabi, menyoroti dengan tajam kasus keracunan makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sejumlah siswi SMK Karya Adi Husada, Rakam, Lombok Timur.

Senator yang akrab disapa Ustaz Farabi itu meminta pemerintah serta pihak terkait melakukan pengawasan ekstra ketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang. “Keracunan akibat MBG ini bukan hal sepele. Perlu pengawasan ekstra ketat supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Keselamatan masyarakat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegas Farabi, Jumat (22/8/2025).

Farabi mengingatkan bahwa program MBG merupakan ikhtiar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, menurutnya, keberlangsungan program harus dipastikan benar-benar aman, higienis, terawasi, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab, kasus keracunan sete-



Anggota DPD RI Muhammad Rifki Farabi. (Foto Istimewa)

“**Keracunan akibat MBG ini bukan hal sepele. Perlu pengawasan ekstra ketat supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Keselamatan masyarakat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.**”

**Anggota DPD RI,
Muhammad Rifki
Farabi**

lah mengonsumsi MBG telah beberapa kali terjadi di sejumlah daerah. Di NTB sendiri, sebelumnya di SDN 2 Sandubaya Selong ditemukan makanan MBG yang sudah busuk bahkan ada belatungnya.

“Kini, siswi-siswi kelas XII SMK Karya Adi Husada Lombok Timur dilarikan ke Puskesmas setelah mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan MBG yang disajikan di sekolahnya. Jangan sampai terulang untuk ketiga kalinya,” tegasnya.

Dengan adanya kasus ini, Farabi mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG agar memperketat standar pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan. “Hal ini penting agar program yang sejatinya mulia ini benar-benar dirasakan manfaatnya tanpa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, khususnya para pelajar,” katanya. (*)

Perkuat Diplomasi Parlemen, DPD RI dan Thailand Dorong Pembentukan FSAT

Betria Eriani

Penulis

Upaya DPD RI membangun kerja sama antarparlemen di kawasan Asia Tenggara mendapat dukungan penuh dari Thailand. Dalam pertemuan dengan Dubes Thailand Prapan Disyatat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025), Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Gusti Farid Hasan Aman, Wakil Ketua BKSP Darmansyah Husein dan Mirah Midadan Fahmid, serta jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) sebagai sarana diplomasi parlemen yang lebih strategis.

Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) adalah sebagai wadah kerja sama antarparlemen, khususnya lembaga senat atau majelis tinggi di kawasan ASEAN. Selain itu, Sultan juga menyampaikan rencana kunjungan resminya ke Thailand untuk bertemu dengan Ketua Senat Thailand dalam rangka membicarakan lebih lanjut gagasan pembentukan FSAT.

“Konsep pembentukan Forum Senat Asia Tenggara harus dilanjutkan dan ditindaklanjuti. Momentum saat ini sangat tepat untuk memperkuat kerja sama antarparlemen, terutama senat di kawasan Asia Tenggara, dalam wadah yang lebih khusus, tidak hanya melalui AIPA. DPD RI telah menyampaikan surat resmi kepada ketua senat di Thailand, Malaysia, Filipina, dan Kamboja, dan saat ini kami menunggu respons lebih lanjut,” kata Sultan.

Duta Besar Thailand Prapan Disyatat menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, pembentukan FSAT akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan diplomasi parlemen di kawasan. “Forum ini sangat potensial untuk memperkuat kerja sama antarparlemen, khususnya senat. Thailand siap mendukung dan melakukan diskusi lanjutan



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi Pimpinan BKSP DPD RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Thailand untuk Indonesia Prapan Disyatat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

guna menyukseskan inisiatif ini. Kami memahami betul pentingnya forum tersebut, dan yang terpenting sekarang adalah persoalan waktu yang tepat untuk merealisasikannya,” ujarnya.

Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman menjelaskan bahwa gagasan pembentukan FSAT murni berasal dari DPD RI sejak dua tahun lalu. Pada 2023, DPD RI bahkan telah mengundang Duta Besar Kamboja untuk Indonesia guna menyampaikan rencana tersebut. Informasi itu kemudian diteruskan kepada Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, yang menyambut positif inisiatif ini dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kelak, Forum Senat Asia Tenggara akan dibentuk oleh lima ketua senat sebagai deklarator. Forum ini bukan untuk menggantikan AIPA, melainkan memperkuatnya. Jika terbentuk, forum ini bahkan dapat diperluas ke kawasan Asia, Asia Pasifik, hingga global. Beberapa mitra internasional, seperti Senat Korea Selatan dan Senat Spanyol, sudah menyatakan minat bekerja sama dengan FSAT seandainya sudah terbentuk,” ungkap Gusti Farid. Ia menambahkan, deklarasi FSAT rencananya akan digelar di Bali pada November 2025 dengan mengundang para ketua senat dari Thailand, Malaysia, Filipina, dan Kamboja, beserta duta besar masing-masing di Jakarta, serta Kementerian Luar Negeri RI. (*)

Penurunan BI Rate Akan Menggairahkan Investasi

Rini Sumarni

Penulis

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) yang menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,00 persen. Ia optimistis, dengan penurunan BI Rate menjadi 5 persen, ekonomi Indonesia memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh, konsumsi masyarakat akan terjaga, investasi semakin bergairah, dan pasar modal semakin stabil.

Menurut Senator Nawardi, keputusan BI sangat tepat karena didukung kondisi inflasi yang terkendali. Inflasi Juli 2025 tercatat hanya 2,37 persen (*yoy*), masih berada dalam target BI sebesar 1,5-3,5 persen. Di sisi lain, perekonomian Indonesia menunjukkan momentum positif dengan pertumbuhan 5,12 persen (*yoy*) pada kuartal II 2025, terutama ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi.

“Penurunan BI Rate ini akan memperkuat daya dorong konsumsi masyarakat karena biaya pinjaman lebih murah, sekaligus memberi stimulus bagi dunia usaha untuk mempercepat investasi. Dengan kondisi inflasi yang stabil, kebijakan ini menjadi dorongan penting agar pertumbuhan ekonomi nasional bergerak lebih cepat,” ujar Ahmad Nawardi, Kamis (21/8/2025).

Nawardi menambahkan, pasar modal Indonesia juga akan diuntungkan. Penurunan suku bunga membuat imbal hasil deposito relatif kurang menarik, sehingga investor cenderung mengalihkan dananya ke saham. Sejarah menunjukkan, Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) kerap merespons positif kebijakan penurunan BI Rate dengan peningkatan aktivitas perdagangan dan aliran modal asing. Pasar saham akan lebih atraktif. Likuiditas yang lebih longgar akan menghidupkan kembali minat investor, dan ini penting untuk memperkuat Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai cermin optimisme ekonomi nasional.

Meski fokus pada dampak positif yang terjadi karena penurunan BI Rate, senator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu mengingatkan bahwa manfaat dari penurunan suku bunga hanya akan optimal jika kebijakan moneter Bank Indonesia berjalan seiring dengan kebijakan fiskal pemerintah.

“Langkah Bank Indonesia sudah tepat. Kini tantangannya adalah bagaimana mempercepat transmisi ke sektor riil agar pinjaman benar-benar lebih terjangkau, konsumsi naik, investasi bergerak, dan pasar saham menguat. Dengan sinergi kebijakan, manfaatnya akan nyata dirasakan masyarakat,” tegasnya. (*)



Anggota DPD RI Ahmad Nawardi
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Swasembada Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa

Helena AF Ojan

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menegaskan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurut Tamsil, program tersebut sejalan dengan Asta Cita yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan.

“Swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. DPD RI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang akan membuka 2 juta hektare sawah baru agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor,” kata Tamsil Linrung menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).

Tamsil menekankan pentingnya pelibatan daerah dalam implementasi program. Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ekstensifikasi lahan, tetapi juga kemudahan akses bagi petani. DPD RI sebagai lembaga wakil daerah di pusat, kata Tamsil, akan mengawal agar petani di daerah mudah mendapatkan



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Yorrys Raweyai dan GKR Hemas saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. DPD RI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang akan membuka 2 juta hektare sawah baru agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor.**”

**Wakil Ketua DPD RI,
Tamsil Linrung**

pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi rumit.

Tamsil juga mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, langkah itu akan langsung meningkatkan kesejahteraan petani. “Stabilitas harga gabah yang menguntungkan diyakini

akan meningkatkan pendapatan petani,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut.

Lebih lanjut, Tamsil menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari irigasi, jalan tani, hingga akses logistik agar hasil panen terserap optimal. Pembukaan sawah baru harus dibarengi pembangunan irigasi dan akses distribusi yang memadai. Selain itu, juga perlu pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan, penimbunan, dan permainan harga yang merugikan masyarakat.

Tamsil mengatakan bahwa kerja sama antarlembaga dan peran daerah akan menjadi kunci tercapainya target swasembada pangan. “Dengan sinergi pusat dan daerah, swasembada pangan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama,” pungkasnya. (*)

Dorong Transparansi, DPD RI Minta Pengawasan Dana Desa Ditingkatkan

Hestina Kiftia Sari

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, Mamberob Rumakiek, menegaskan bahwa pengawasan terhadap dana desa harus terus diperkuat agar betul-betul menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Menurut Mamberob, banyak persoalan dalam pengelolaan keuangan atau dana desa. Di antaranya, lemahnya transparansi, terbatasnya kapasitas aparatur, hingga munculnya proyek fiktif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya pengawasan, serta proses perencanaan yang tidak komprehensif juga menjadi tantangan.

“Oleh karena itu, perlu sinergi antarlembaga, mulai dari pemerintah daerah, BPKP, Kementerian Desa, masyarakat desa, hingga DPD RI,” ujar Mamberob dalam *Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa* yang diselenggarakan BPKP Perwakilan Papua Barat Daya, di Kabupaten Sorong, Rabu (27/8/2025).

Mamberob menegaskan, dana desa bisa berdampak signifikan bagi peningkatan



Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan BPKP Perwakilan Papua Barat Daya, di Kabupaten Sorong. (Foto BPKP)

“**Oleh karena itu, perlu sinergi antarlembaga, mulai dari pemerintah daerah, BPKP, Kementerian Desa, masyarakat desa, hingga DPD RI.**”

Anggota DPD RI, Mamberob Rumakiek

kesejahteraan apabila dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. DPD RI, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa dana desa digunakan tepat sasaran. “Pengawasan harus lebih efektif dan partisipatif, sehingga desa tidak hanya kuat secara administrasi, tetapi juga mandiri dalam membangun kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Daya, Edi Sunardi, mengatakan bahwa peningkatan akuntabilitas menjadi kunci pengelolaan keuangan desa. Mulai dari kualitas perencanaan agar tidak terlambat saat penyaluran, hingga pelaksanaan sesuai prioritas penggunaan dana desa sebagaimana ditetapkan Kementerian Desa pada 2025, seperti ketahanan pangan, bantuan langsung tunai (BLT), dan program prioritas lainnya.

Edi juga menekankan pentingnya pelaporan yang akuntabel dan transparan. Pelaksanaan program menggunakan dana desa harus sesuai dengan perencanaan serta dilaporkan secara benar. “Tujuan penyaluran dana desa adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya. (*)

Pemerintah Jangan Terburu-buru Hidupkan Program Transmigrasi

Lela Sadiyah

Penulis

Rencana pemerintah pusat untuk kembali menghidupkan program transmigrasi mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tersebut sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan transmigrasi yang telah berjalan selama ini.

Menurutnya, program transmigrasi kerap menimbulkan persoalan di daerah, khususnya menyangkut isu ketimpangan kepemilikan tanah antara masyarakat lokal dan warga transmigran. Ia menyoroti kemudahan yang diterima para transmigran dalam memperoleh sertifikat hak milik tanah. Sementara masyarakat lokal, termasuk suku Dayak yang telah menetap secara turun-temurun, justru masih banyak yang kesulitan mendapatkan legalitas atas tanah adat mereka.

“Pemerintah pusat harus betul-betul memikirkan dampaknya bagi daerah, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah. Jangan



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sampai program transmigrasi ini menimbulkan konflik baru di daerah,” kata mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode itu, dalam *Podcast* PMKRI Palangka Raya, Minggu (24/8/2025).

Teras Narang menegaskan bahwa isu pertanahan merupakan akar dari ketegangan sosial yang kerap terjadi di sejumlah wilayah transmigrasi. Banyak masyarakat adat yang hingga kini belum memperoleh pengakuan hukum atas wilayah yang mereka tempati, sementara para pendatang dapat langsung memperoleh hak kepemilikan. “Ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat lokal. Kita harus adil. Jangan yang baru datang langsung dapat hak, sementara yang sudah lama tinggal justru

kesulitan,” tegasnya.

Dia berpandangan, sebelum melanjutkan program transmigrasi, pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan evaluasi dan revitalisasi terhadap kawasan transmigrasi yang sudah ada. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan transmigran benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat asli.

Teras Narang juga mengimbau pemerintah pusat agar lebih mendengarkan aspirasi daerah dan bersikap bijak dalam menyusun kebijakan, agar tidak menimbulkan ketimpangan baru yang berpotensi memicu konflik sosial di masa mendatang. (*)

Negara Wajib Lindungi Tenaga Medis dari Kekerasan

Arso P Nugroho

Penulis

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kekerasan verbal dan intimidasi fisik yang dialami oleh seorang dokter, Syahpri Putra Wangsa, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu, Kabupaten Banyuwangi, Sumatera Selatan, pada 12 Agustus 2025.

“Peristiwa ini sangat memprihatinkan, karena bukan hanya melukai martabat pribadi seorang dokter, melainkan juga mencederai prinsip kemanusiaan serta menyalahi tata nilai dalam pelayanan kesehatan,” tegas senator dari Papua Barat itu, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Filep menekankan bahwa negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi tenaga medis yang sedang menjalankan tugas profesionalnya. Tindakan intimidasi, baik dalam bentuk verbal maupun fisik, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Karena itu, Filep mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, atau pengaduan terkait pelayanan



Anggota DPD RI Filep Wamafma. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Peristiwa ini sangat memprihatinkan, karena bukan hanya melukai martabat pribadi seorang dokter, melainkan juga mencederai prinsip kemanusiaan serta menyalahi tata nilai dalam pelayanan kesehatan.**”

**Ketua Komite III
DPD RI,
Filep Wamafma**

rumah sakit melalui mekanisme yang resmi, bukan dengan tindak kekerasan. Ia juga mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan kekerasan tersebut.

Selain itu, Filep mendorong

Kementerian Kesehatan agar memperkuat program perlindungan tenaga medis melalui regulasi yang jelas serta memastikan setiap fasilitas kesehatan memiliki mekanisme penanganan konflik antara keluarga pasien dan tenaga medis. Menurutnya, menjaga keselamatan tenaga medis berarti menjaga keselamatan pasien dan masyarakat luas. “Tanpa adanya perlindungan serta rasa aman bagi dokter dan tenaga kesehatan, pelayanan yang optimal bagi rakyat Indonesia tidak mungkin tercapai,” ujarnya.

Filep juga menegaskan bahwa Komite III DPD RI, yang dipimpinnya dan membidangi urusan kesehatan, berkomitmen untuk terus mengawal kasus tersebut hingga ada kepastian hukum dan jaminan perlindungan menyeluruh terhadap tenaga medis di seluruh Indonesia. (*)

MPR *for* Papua Sesalkan Penanganan Demo di Sorong

Adhi Nugroho

Penulis

Anggota DPD RI dan DPR RI asal Papua yang tergabung dalam MPR *for* Papua menyesalkan terjadinya kerusuhan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi se-Sorong Raya, Rabu (27/8/2025), yang menolak pemindahan empat tahanan politik (tapol) dari Sorong ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketua MPR *for* Papua, yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai, menyalahkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil maupun aparat keamanan dalam insiden tersebut. “Unjuk rasa dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di ruang publik. Tugas aparat adalah memberikan rasa aman agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik,” ujar Yorrys dalam keterangannya, Rabu (28/8/2025).

Yorrys mempertanyakan pola penanganan aparat dalam merespons aksi massa. Menurutnya, pengamanan seharusnya dilakukan secara terukur, terencana, dan mengedepankan pendekatan persuasif serta humanis, bukan represif atau memo-



Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai (kanan) bersama Filep Wamafma. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sisikan massa sebagai musuh. Kapolri, kata Yorrys, juga sudah menginstruksikan agar aparat mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional dalam menghadapi aksi unjuk rasa.

“Jika masih ada korban jiwa, berarti ada yang keliru dalam pelaksanaannya,” tegas Yorrys yang membandingkan penanganan demonstrasi di Jakarta beberapa hari sebelumnya. Meski sempat terjadi keributan, aparat dinilai mampu menahan diri dan mengendalikan situasi tanpa menimbulkan korban jiwa.

Sekretaris Jenderal MPR *for* Papua, Filep Wamafma, juga menyampaikan kritik keras terhadap sikap aparat keamanan dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu merupakan

bentuk kekecewaan atas kebijakan pemindahan tahanan yang dinilai sewenang-wenang. Pemindahan empat tapol yang diduga melakukan makar itu, sesungguhnya tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Maka wajar jika masyarakat mengkritisi kebijakan tersebut.

Menurut Filep, polemik terkait pemindahan tapol seharusnya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Ia menyalahkan langkah tergesa-gesa dan sepihak yang justru memperkeruh suasana. “Tindakan sepihak aparat hanya akan menghambat upaya bersama yang selama ini dibangun untuk menjadikan Tanah Papua sebagai Tanah Damai,” kata Filep. (*)

DPD RI Dukung BP Haji Jadi Kementerian Haji dan Umrah

Theresia Oktavina

Penulis

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Erni Daryanti, mendukung penuh pengesahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, perubahan kelembagaan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada jemaah.

“Haji merupakan ibadah yang melibatkan jumlah jemaah sangat besar setiap tahunnya, sehingga memerlukan manajemen yang lebih fokus, terpadu, dan berkesinambungan. Kehadiran Kementerian Haji akan menjadi solusi agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika di Arab Saudi maupun dalam negeri,” ujar Erni di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Senator asal Kalimantan Tengah itu menegaskan pentingnya peran negara hadir secara lebih kuat dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji



Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dan umrah. Dengan adanya Kementerian Haji, koordinasi antar lembaga terkait diharapkan semakin efektif dan efisien.

Erni juga menyoroti pentingnya pemerataan pelayanan bagi calon jemaah di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil. Selain itu, keberadaan kementerian ini diharapkan dapat mengoptimalkan diplomasi Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi agar kuota haji terus ditingkatkan, menjamin transparansi biaya haji, serta memastikan keberpihakan penuh pada jemaah.

“Dukungan terhadap pengesahan Kementerian Haji merupakan bentuk komitmen DPD RI dalam memperjuangkan aspi-

rasi umat Islam di seluruh Indonesia. Kita ingin ibadah haji tidak hanya lancar secara teknis, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual terbaik bagi jemaah. Dengan adanya Kementerian Haji, harapan tersebut bisa lebih mudah diwujudkan,” tegasnya.

Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, dengan melibatkan DPD RI dalam pembahasan tingkat II. Salah satu poin penting revisi ini adalah peningkatan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. (*)

Irman Gusman Soroti Pidato Prabowo: Pasal 33 Harus Jadi Benteng Hadapi Ketimpangan



Senator Irman Gusman (tengah) dalam sebuah diskusi di Jakarta. (Foto Tim IG)

Theresia Oktavina

Penulis

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), menuai tanggapan positif dari anggota DPD RI, Irman Gusman.

Irman menilai pesan Presiden tentang pembangunan ekonomi berkeadilan merupakan arah strategis yang sejalan dengan amanat konstitusi. “Banyak isu strategis yang disampaikan Presiden Prabowo, tapi yang menarik perhatian saya adalah tekad beliau membangun ekonomi yang adil. Presiden menegaskan kembali pasal-pasal pengaman UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, sebagai benteng ekonomi

“**Banyak isu strategis yang disampaikan Presiden Prabowo, tapi yang menarik perhatian saya adalah tekad beliau membangun ekonomi yang adil. Presiden menegaskan kembali pasal-pasal pengaman UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, sebagai benteng ekonomi nasional.**”

**Anggota DPD RI,
Irman Gusman**

nasional,” ujar Irman, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, penekanan pada asas kekeluargaan dalam perekonomian sangat relevan. Meski pertumbuhan

ekonomi stabil di kisaran 5 persen selama dua dekade terakhir, ketimpangan sosial-ekonomi masih menganga lebar.

“Rasio gini naik dari 0,31 pada 1998 menjadi 0,37 hari ini. Bahkan riset Celios pada 2024 menyebut kekayaan 50 orang terkaya setara dengan harta 50 juta warga biasa. Angka-angka ini menunjukkan ketimpangan serius,” jelas senator asal Sumatera Barat itu.

Irman juga menyinggung data BPS yang mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada triwulan II-2025. Namun, kenaikan pendapatan masyarakat hanya di bawah 2 persen. “Sementara segelintir orang bisa menambah kekayaan hingga triliunan rupiah per tahun, masyarakat kecil hanya merasakan kenaikan pendapatan yang minim. Kondisi ini tidak adil,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti ketimpangan lahan pertanian. Rata-rata petani hanya menguasai 0,3 hektar, sementara satu keluarga bisa menguasai hingga 1,8 juta hektar.

“Jurang ketimpangan seperti ini jelas menghambat keadilan sosial yang menjadi cita-cita kita bersama,” pungkask Irman. (*)

BP LNG Tangguh Harus Prioritaskan Tenaga Lokal

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Barat, Filep Wamafma, menyoroti problematika tenaga kerja orang asli Papua di BP LNG Tangguh, Bintuni, Papua Barat. Ia menegaskan bahwa British Petroleum (BP) selaku operator Tangguh harus memprioritaskan peluang kerja dan pengembangan karier bagi masyarakat lokal Papua.

Filep menyayangkan kondisi yang dikeluhkan pekerja asal Papua yang menolak mekanisme rekrutmen teknisi/operator LNG Tangguh saat ini. Para pekerja bahkan telah mengajukan peninjauan ulang terhadap syarat dan mekanisme rekrutmen yang dinilai tidak mengakomodasi tenaga kerja Papua. Namun, hingga kini belum ada respons, dan proses rekrutmen tetap berjalan.

“Kami menerima keluhan dan kekecewaan masyarakat pekerja asal Papua bersama Serikat Pekerja LNG Tangguh karena rekrutmen yang berjalan ini tidak memberi peluang bagi orang Papua. Padahal BP telah menargetkan mempekerjakan 85 persen tenaga kerja asal Papua pada tahun 2029, se-



Kilang LNG Tangguh yang dioperasikan oleh BP Berau Ltd, di Teluk Bintuni, Papua Barat. (Foto Kementerian ESDM)

bagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL,” kata Filep, Rabu (20/8/2025).

Ia menambahkan, komitmen untuk mengembangkan talenta Papua sudah berulang kali disampaikan BP, salah satunya melalui program pendidikan dan pelatihan agar anak-anak Papua memiliki keterampilan sesuai standar tenaga kerja di sektor migas. “Jangan sampai yang sedang berjalan ini justru melenceng dari komitmen itu. Hal ini harus benar-benar dikawal,” tegasnya.

Filep menilai problematika tenaga kerja Papua saat ini terjadi akibat pengabaian BP Tangguh terhadap laporan Tim Penasehat Independen Tangguh (TIAP). Sejak 2020, TIAP telah menyampaikan laporan khusus terkait pengembangan tenaga kerja Papua, termasuk rekomen-

si agar program pemagangan dilanjutkan dan ditingkatkan *output*-nya sesuai kebutuhan SDM di Tangguh.

Ia juga mengingatkan komitmen BP untuk melanjutkan program *challenger* yang membuka peluang bagi orang Papua hingga mencapai level manajemen senior. Dalam respons terhadap laporan TIAP tahun 2020, BP bahkan menyatakan akan terus meningkatkan rekrutmen talenta Papua, baik lulusan baru maupun tenaga berpengalaman, untuk mendukung operasional. “Rekam jejak respons BP terhadap laporan TIAP pada 2020 sudah jelas menunjukkan komitmen memperluas dan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat Papua. Apalagi proyek Tangguh ini juga merupakan proyek strategis nasional,” tutup Filep. (*)



DPD RI Kocok Ulang Pimpinan Alat Kelengkapan

Betria Eriani

Penulis

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pemilihan ulang atau kocok ulang pimpinan alat kelengkapan (alkel) untuk Tahun Sidang 2025–2026, yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan dalam rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI. Pemilihan dilakukan secara tertib, lancar, dan demokratis, dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai.

“Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025–2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini?” tanya Ketua DPD RI Sultan B Najamudin yang memimpin sidang tersebut. Pertanyaan itu dijawab dengan kata “setuju” oleh peserta sidang.

Sultan mengharapkan kepada pimpinan alkel yang telah terpilih agar segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan tugas konstitusional DPD RI, khususnya dalam mengawal aspirasi dan kepentingan daerah. “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” kata Sultan.

Pemilihan ulang pimpinan alkel DPD RI tersebut didasarkan pada Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib dan dilakukan setiap tahun sidang sesuai mekanisme yang berlaku. Prosesnya diawali melalui rapat di masing-masing subwilayah untuk



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi para wakil ketua saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI pengesahan pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

menentukan nama-nama calon, yang kemudian disepakati dalam sidang paripurna. (*)

Susunan Pimpinan Alkel DPD RI 2025-2026

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kocok ulang pimpinan alat kelengkapan (alkel) untuk Tahun Sidang 2025–2026. Kocok ulang tersebut berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, yaitu pemilihan ulang pimpinan alkel dilakukan setiap tahun sidang. Berikut susunan lengkap pimpinan alkel DPD RI Tahun Sidang 2025–2026:

<p>Komite I Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur) Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua) Waka II: Bahar Buasan (Babel) Waka III: Muhdhi (Jawa Tengah)</p>	<p>Daya)</p>
<p>Komite II Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara) Waka I: Angelius Wake Kako (NTT) Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan) Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)</p>	<p>Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah) Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara) Waka II: Sewitri (Riau) Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)</p>
<p>Komite III Ketua: Filep Wamafma (Papua Barat) Waka I: Dailami Firdaus (DKI Jakarta) Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat) Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)</p>	<p>Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan) Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung) Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat) Waka III: Henock Puraro (Papua)</p>
<p>Komite IV Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur) Waka I: Novita Anakotta (Maluku) Waka II: Elviana (Jambi) Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)</p>	<p>Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Ketua: Ahmad Syaqui (Daerah Istimewa Yogyakarta) Waka I: Abdul Hakim (Lampung) Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur) Waka III: Adriana Dondokambej (Sulawesi Utara)</p>
<p>Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara) Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara) Waka II: Abdul Hamid (Riau) Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)</p>	<p>Badan Kehormatan (BK) DPD RI Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau) Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur) Wakil II : A. Jan Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat) Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)</p>
<p>Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara) Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu) Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat) Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat)</p>	<p>Kelompok DPD RI di MPR RI Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara) Untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD RI. (*)</p>

Komite IV DPD RI Soroti Penagihan KUR dan Peran OJK di Sulut

Theresia Oktavina

Penulis

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (23/8/2025), dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan advokasi ini melibatkan OJK Sulutgomalut, bank-bank Himbara, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Pegadaian Provinsi Sulawesi Utara.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari OJK dan pelaku industri keuangan terkait perkembangan sektor perbankan dan jasa keuangan di Sulawesi Utara. Selain itu, Komite IV juga menggali data mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah tersebut untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan layanan lembaga keuangan.

Senator asal Sulawesi Utara, Maya Rumantir, menyampaikannya bahwa indeks inklusi keuangan provinsi itu berada pada angka 50,13 persen, sementara indeks literasi keuangan mencapai 86,23 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, masing-masing 49,68



Komite IV DPD RI dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Utara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

persen dan 86,23 persen. Meski demikian, Maya menegaskan perlunya menjaga independensi OJK dari berbagai tekanan eksternal agar stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengungkapkan sejumlah keluhan masyarakat terkait layanan perbankan dan lembaga keuangan. Salah satunya, adanya pengajuan kredit sepihak dari produk keuangan yang seharusnya memerlukan persetujuan pasangan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan praktik penagihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai kasar dan cenderung seperti dilakukan oleh rentenir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OJK Sulutgomalut Robert Sianipar menjelaskan bahwa perkembangan industri keuangan di Sulawesi

Utara tergolong sehat dengan tingkat kredit bermasalah atau *non-performing loan (NPL)* yang rendah, termasuk dari sektor KUR. Robert juga menegaskan bahwa OJK terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan praktik penyaluran dan penagihan kredit tetap sesuai regulasi yang berlaku.

Sementara itu, perwakilan PNM Sulut, Zulfikar Arsyad, menyoroti permasalahan pengajuan kredit yang tidak melibatkan persetujuan pasangan sebagai isu krusial. Ia juga menjelaskan bahwa suku bunga PNM relatif lebih tinggi karena program pemberdayaan UMKM memerlukan pendampingan intensif, termasuk di daerah-daerah tertinggal yang sulit dijangkau. Menurutnya, tingginya bunga merupakan konsekuensi dari upaya memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. (*)

Revisi UU Sisdiknas Satukan Kebijakan Pendidikan Nasional

Adhi Nugroho

Penulis

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan perhatian serius terhadap revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini sedang dibahas di Komisi X DPR RI. Revisi tersebut ditargetkan rampung dan disahkan pada 2025, dengan mengintegrasikan sejumlah regulasi, yakni UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyebut revisi UU Sisdiknas sebagai momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, langkah ini juga bertujuan memperkuat posisi guru dan dosen, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, serta mengakomodasi kekhasan pendidikan pesantren.

“Komite III DPD RI mendorong agar revisi UU Sisdiknas benar-benar menghadirkan sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan negara



Komite III DPD RI usai RDPU bersama PGRI dan FSGI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

wajib memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal,” kata Filep dalam rapat dengan pendapat umum dengan pemerhati pendidikan dan organisasi profesi guru, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, menegaskan pentingnya keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini masih jauh dari kata layak. “Soal pendidikan memang sering kita alami, maka penting sekali kita perjuangkan kesejahteraan guru, terutama honorer. Masa mereka hanya menerima gaji Rp200-300 ribu saja? Ini sangat tidak adil,” ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Jejen Musfah, juga menyoroti sistem penerimaan murid baru yang dinilai belum mampu memperbaiki masalah lama.

“Sistem baru tidak bisa meminimalisir kelemahan sistem lama. Sistem domisili tidak mampu mengubah kesan sekolah favorit di masyarakat karena kualitas sekolah negeri dan swasta belum merata. Akibatnya, berbagai kecurangan dan manipulasi terus terjadi,” kata Jejen.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan wilayah kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri di jenjang SMP, SMA, dan SMK, lalu berkoordinasi dengan Kemendikdasmen. “Penting dilakukan pemetaan wilayah tanpa sekolah negeri, pengalihan gedung sekolah dasar negeri (SDN) yang kosong dijadikan SMP, serta pelibatan sekolah swasta melalui program penerimaan bersama, seperti yang sudah diterapkan di DKI Jakarta,” ujarnya. (*)

DPD RI Dorong Peran Lebih Jelas dalam Pengawasan Penyelenggaraan Haji



Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma didampingi Wakil Ketua Komite III Dailami Firdaus menyerahkan pandangan DPD RI kepada Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan pandangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Sabtu (23/8/2025), di Jakarta.

Rapat yang dihadiri Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma dan Wakil Ketua Komite III Dailami Firdaus itu menyoroti sejumlah aspek penting penyelenggaraan ibadah haji. “Kehadiran DPD RI dalam pembahasan RUU ini

bukan sekadar menjalankan mandat konstitusi, melainkan juga membawa aspirasi daerah agar penyelenggaraan haji lebih transparan, adil, dan berpihak pada jemaah,” kata Dailami.

Dalam rapat tersebut, Komite III DPD RI menekankan perlunya pembentukan kelembagaan khusus yang setara dengan kementerian untuk mengelola penyelenggaraan haji. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Selain itu, pengawasan terhadap kuota nonreguler dan keberangkatan jemaah umrah mandiri juga dinilai mendesak guna melindungi masyarakat dari praktik biro travel ilegal.

DPD RI juga menyoroti perlunya transparansi pem-

biayaan haji, termasuk keterbukaan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada publik dan DPD RI. Penguatan sinergi antar-lembaga, audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mekanisme kompensasi bila terjadi kegagalan pelayanan menjadi salah satu catatan penting.

Berdasarkan pengalaman selama pandemi Covid-19, DPD RI mengusulkan adanya regulasi khusus untuk penanganan kondisi darurat. DPD RI mendorong adanya musyawarah bersama antara DPR RI dan DPD RI dalam menentukan skema penyelenggaraan haji di masa krisis, termasuk memastikan jaminan pengembalian biaya (*refund*) dan prioritas keberangkatan bagi jemaah yang tertunda.

“Pembahasan RUU ini merupakan momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji secara menyeluruh. Kami berharap regulasi baru ini benar-benar menghadirkan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik, bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga sampai ke daerah. Sebab, jemaah haji berasal dari seluruh pelosok negeri, dan negara wajib memastikan keadilan pelayanan bagi semuanya,” tegas Dailami. (*)

Hampir Seluruh Daerah Alami Kendala dalam Penyusunan Perda

Rini Sumarni

Penulis

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan pentingnya memperkuat harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah guna memastikan kebijakan pembangunan berjalan efektif dan berkeadilan. Pasalnya, hasil reses anggota BULD menunjukkan masih banyak persoalan serius dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah (ranperda) maupun peraturan daerah (perda) di berbagai daerah.

Ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow, mengungkapkan hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam penyusunan perda. Hambatan tersebut mencakup regulasi pusat yang kaku dan tidak selalu selaras dengan kebutuhan daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran, hingga lemahnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan.

“Kondisi ini berdampak pada lambannya proses penyusunan perda dan menurunkan efektivitas pelaksanaannya. Bahkan, tak jarang rancangan perda gagal difasilitasi oleh pemerintah pusat,” kata Stefanus dalam



Pimpinan dan anggota BULD DPD RI bersama pakar pemerintahan daerah dari UKSW Salatiga Umbu Rauta, usai menggelar RDPU. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kondisi ini berdampak pada lambannya proses penyusunan perda dan menurunkan efektivitas pelaksanaannya. Bahkan, tak jarang rancangan perda gagal difasilitasi oleh pemerintah pusat.**”

**Ketua BULD DPD RI,
Stefanus BAN Liow**

rapat dengar pendapat umum bersama Guru Besar Hukum Pemerintahan Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Stefanus, BULD DPD RI memosisikan diri sebagai penghubung sekaligus penguat kapasitas legislasi daerah. Sinkronisasi antara regulasi pusat dan

daerah harus berjalan seiring, di mana perda wajib selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional, namun tetap responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal.

“BULD DPD RI akan terus mendorong agar mekanisme penyusunan perda tidak hanya sekadar memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat daerah. Harmonisasi ini penting agar pembangunan di daerah dapat berjalan efektif dan berkeadilan,” tegas senator asal Sulawesi Utara itu.

Sementara itu, Umbu Rauta menilai rendahnya kualitas penyusunan perda berawal dari lemahnya naskah akademik. “Proses penyusunan naskah akademik sering kali berbeda-beda, bahkan kerap dimaknai sebagai proyek. Akibatnya, kualitas naskah akademik kerap terabaikan,” jelasnya. (*)

Raker Komite II Bersama Wamenhub Para Senator Sampaikan Aspirasi Dapil



Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI bersama Wamenhub Suntana usai menggelar rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Helena AF Ojan

Penulis

Rapat kerja antara Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Kementerian Perhubungan yang dihadiri Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/08/2025), mendapat perhatian yang luar biasa dari para senator. Para senator menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di daerah pemilihannya yang berhubungan dengan Kementerian Perhubungan.

Senator Stefanus BAN Liow, misalnya, menyampaikan sejumlah isu strategis perhubungan di dapilnya Sulawesi Utara, baik perhubungan darat, laut, maupun udara. Lima isu strategis yang disampaikan yakni terkait penanganan keselamatan penumpang transportasi laut pasca kebakaran KM Barcelona V, angkutan massal perkotaan, pe-

netapan sejumlah pelabuhan di daerah kepulauan sebagai pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri, relokasi Pelabuhan Laut Karatung, dan reaktivasi Bandara Miangas.

“Kami memberikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan dan jajarannya yang memberikan perhatian pasca kebakaran KM Barcelona V. Hanya saja saat ini kami peroleh data bahwa belum ada kesimpulan investigasi dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini KNKT, tentang peristiwa kebakaran KM Barcelona. Sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada, tinggal bagaimana melaksanakannya di lapangan,” tegas Senator Stefanus.

Senator Stefanus juga mendorong agar perbaikan infrastruktur perhubungan laut dan udara dapat diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan. Di antaranya relokasi dan perbaikan Pelabuhan Karatung serta pengaktifan kembali Bandara Miangas untuk meningkatkan aksesibilitas dan

kesejahteraan masyarakat perbatasan Indonesia-Filipina.

Selanjutnya mengenai angkutan perkotaan yang perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Saat dia melakukan reses, Kepala Dinas Perhubungan meminta agar dibantu untuk segera dilakukan penetapan Pelabuhan Tahuna Kabupaten Sangihe dan Pelabuhan Melonguane Kepulauan Talaud sebagai pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri, khususnya untuk kawasan perbatasan Indonesia-Filipina.

Apa yang disampaikan oleh Senator Stefanus mendapatkan apresiasi dari Wamenhub Suntana. Sebab, dianggap mengetahui dengan jelas urgensi perhubungan dan pembangunan perhubungan di Sulut. Suntana juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama warga Sulawesi Utara dan apresiasi khusus untuk Senator Stefanus yang terus mengawal aspirasi serta perjuangan memajukan kualitas dan kuantitas perhubungan di Sulawesi Utara. (*)

Kembalikan Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton ke Pemkab Siak

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Riau, Abdul Hamid, meminta Kementerian Perhubungan untuk menyerahkan kembali pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton ke Pemerintah Kabupaten Siak melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Samudera Siak. Keberadaan pelabuhan tersebut dinilainya memegang peranan penting dalam upaya memajukan Negeri Istana Siak.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Siak, kami menyampaikan aspirasi yang sangat penting agar pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton dapat dikembalikan kepada BUMD setempat, yaitu PT Samudera Siak,” kata Abdul Hamid dalam rapat kerja Komite II DPD RI bersama Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Selasa (26/8/2025).

Abdul Hamid menyebut Pelabuhan Tanjung Buton adalah urat nadi perekonomian masyarakat Siak. Jika pengelolannya dilakukan BUMD, manfaat ekonominya akan berputar kembali untuk pembangunan daerah. Hamid menegaskan, pengelolaan pelabuhan itu akan lebih progresif dalam merespons



Anggota DPD RI Abdul Hamid menyerahkan berkas permohonan perpanjangan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Buton kepada Wamenhub Suntana. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kebutuhan lokal dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Abdul Hamid menyerahkan langsung berkas permohonan perpanjangan sewa pengoperasian Pelabuhan Tanjung Buton kepada Wamenhub Suntana. “Hari ini saya tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menyerahkan secara langsung berkas permohonan dari Pemkab Siak kepada Bapak Wakil Menteri. Kami berharap Kemenhub dapat mempertimbangkan permohonan ini dengan melihat dampak positif yang lebih luas bagi daerah,” tambahnya.

Selain itu, Abdul Hamid juga meminta Kementerian Perhubungan segera meng-

aktifkan kembali Bandara Tempuling dan Pelabuhan Samudera di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dia menyebut kondisi Bandara Tempuling kini sangat memprihatinkan akibat keterbatasan anggaran daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengambil alih aset sekaligus operasional bandara.

Sedangkan Pelabuhan Samudera yang sejak 1996 telah dihibahkan kepada PT Pelindo, hingga kini tidak beroperasi. “Sudah hampir tiga dekade Pelabuhan Samudera terbengkalai tanpa aktivitas bongkar muat. Padahal keberadaannya sangat penting untuk mobilitas masyarakat dan distribusi komoditas di Inhil,” kata Hamid. (*)

Potensi Pariwisata NTB Butuh Akses Transportasi



Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid bersama Wamenhub Sultana. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, meminta perhatian khusus Kementerian Perhubungan terhadap status pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan, yang hingga kini status pengelolannya masih menjadi tanda tanya. Padahal, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pelabuhan tersebut sangat besar, mencapai lebih dari Rp1 miliar per bulan.

“Jika status pengelolaan pelabuhan ini sudah bisa diserahkan kepada pemerintah daerah, maka itu akan menjadi sumber PAD yang signifikan. Apalagi daerah sedang berupaya mencari

potensi pendapatan baru,” ujar Mirah dalam rapat kerja Komite II DPD RI dengan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Sultana, Selasa (26/8/2025).

Mirah juga menyoroti keterbatasan akses transportasi udara yang menjadi hambatan utama masuknya wisatawan ke NTB. Meskipun Lombok International Airport telah menjadi pintu masuk utama, keterbatasan jumlah maskapai masih menjadi kendala serius. Kondisi ini terjadi di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Bima dan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin di Sumbawa, yang hingga kini hanya dilayani satu maskapai.

Selain sektor laut dan udara, Mirah juga menyoroti kondisi transportasi darat di NTB, khususnya infrastrukt-

tur penerangan jalan. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen penerangan jalan di NTB masih belum berfungsi, termasuk di koridor vital menuju kawasan wisata. “Bayangkan, kawasan wisata internasional tetapi jalannya gelap gulita. Ini jelas mengurangi kenyamanan wisatawan dan berpotensi menghambat pengembangan pariwisata,” tegasnya.

Mirah menekankan bahwa ketiga isu tersebut harus diselesaikan dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Balai Pengelola Transportasi Darat. Menurutnya, langkah percepatan sangat penting agar potensi besar pariwisata NTB tidak terhambat oleh masalah teknis infrastruktur.

NTB memiliki potensi wisata kelas dunia yang tidak kalah dari daerah lain. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sulit bagi NTB untuk meraih manfaat ekonomi yang maksimal dari sektor pariwisata. “Transportasi adalah urat nadi pariwisata. Pelabuhan, bandara dengan akses memadai, serta jalan yang terang dan aman adalah syarat mutlak. Pemerintah pusat harus memastikan ini terwujud agar NTB benar-benar menjadi destinasi unggulan,” pungkas Mirah. (*)

Senator Syarif Melvin Usulkan Penggantian Nama Bandara Supadio

Lela Sadiyah

Penulis

Dalam rapat kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Kementerian Perhubungan, Selasa (26/8/2025), Senator asal Kalimantan Barat Syarif Melvin, yang juga Sultan Pontianak ke-IV, mengusulkan penggantian nama Bandara Supadio menjadi Bandara Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie.

Menurut Syarif Melvin, usulan ini bukan sekadar soal pergantian nama, tetapi merupakan upaya mengembalikan penghormatan kepada pendiri Kota Pontianak, Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie sosok religius dan visioner yang mendirikan kota pada 23 Oktober 1771. Jejak sejarahnya masih terlihat melalui Masjid Jami' dan Istana Kadriah, dua simbol penting yang berdiri di tepi Sungai Kapuas.

Bandara Supadio sendiri awalnya bernama Bandar Udara Sungai Durian. Pada 1970-an, namanya diganti untuk mengenang Letkol Supadio, perwira TNI AU yang gugur dalam kecelakaan pesawat di Bandung tahun 1966. Meski patut dihormati, tokoh ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Pontianak maupun Kalimantan Barat.



Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat Syarif Melvin menyerahkan proposal usulan perubahan nama Bandara Supadio kepada Wamenhub Suntana. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Sudah saatnya bandara kebanggaan Kalbar menyanjung nama tokoh besar yang memang memiliki ikatan langsung dengan sejarah Pontianak. Nama Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie jelas lebih dekat dengan identitas masyarakat,” ujar Syarif Melvin.

Ia menambahkan, ada enam alasan utama yang melatarbelakangi usulan tersebut, yaitu:

1. Menghormati tokoh sejarah.
2. Memperkuat identitas budaya lokal.
3. Meningkatkan daya tarik wisata.
4. Mengikuti tren nasional penghormatan tokoh lokal.
5. Membangkitkan kebanggaan masyarakat.
6. Memperbaiki penamaan yang kini dianggap kurang relevan.

Selain itu, Syarif Melvin menyoroti potensi bandara yang baru kembali berstatus internasional, namun dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, peluang penerbangan ke Kuching, Kuala Lumpur, dan Singapura terbuka lebar. Sejumlah maskapai seperti Lion Air, Citilink, dan Air Asia disebut siap membuka rute tersebut, asalkan mendapat dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana menyatakan sikap positif.

“Proposal usulan yang dibawa Pak Syarif Melvin kami terima. Untuk perubahan nama Bandara Supadio menjadi Bandara Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie akan kami tindaklanjuti bersama DPR RI,” ujarnya. (*)

Perlu Diintegrasikan Pariwisata dan Energi Terbarukan



Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman saat memimpin rapat secara virtual. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Adhi Nugroho

Penulis

Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Farid Hasan Aman menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Target ambisius ini bukan tanpa preseden, namun harus ditempuh melalui strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Pertumbuhan serupa memang pernah tercapai di masa lalu, tetapi sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah yang rentan. Kini strategi pembangunan diarahkan pada

hilirisasi industri, transformasi digital, dan penguatan sektor pariwisata,” ucap Gusti Farid saat rapat kerja secara virtual dengan pihak PLN, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, pariwisata memiliki potensi unik karena tumbuh dari keragaman lokal, memberdayakan komunitas, serta memberikan efek ganda yang signifikan terhadap ekonomi nasional maupun daerah. Data tahun 2024 menunjukkan geliat positif sektor pariwisata, dengan lebih dari 13,9 juta wisatawan mancanegara, 1,02 miliar perjalanan wisatawan nusantara, kontribusi terhadap PDB sebesar 4,04 persen, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 25 juta orang.

“Capaian tersebut tidak menutup fakta masih adanya tantangan struktural, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terperencil, Tertinggal). Namun, kita masih menghadapi masalah aksesibilitas, keterbatasan fasilitas dasar, kualitas SDM pariwisata, hingga pasokan listrik yang belum memadai. Padahal, listrik merupakan denyut nadi aktivitas pariwisata modern,” jelas senator asal Kalimantan Selatan ini.

Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya penguatan infrastruktur kelistrikan, sejalan dengan agenda transisi energi menuju sumber daya bersih dan berkelanjutan. Pada dasarnya Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan yang banyak tersebar di kawasan wisata unggulan.

Wakil Ketua BKSP DPD RI Mirah Midadan Fahmid menegaskan kebutuhan listrik tidak hanya krusial bagi sektor pariwisata, tetapi juga bagi seluruh sektor strategis di berbagai daerah. “Ketersediaan dan keandalan suplai listrik merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujar Mirah. (*)

Tindak Lanjut IHPS II 2024 BAP Kunjungan Kerja ke DIY

Arso P Nugroho

Penulis

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024, Jumat (29/8/2025).

Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua BAP DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno.

“Kami hadir memastikan hasil pemeriksaan BPK benar-benar ditindaklanjuti. Prinsipnya sederhana, jika ada kerugian negara harus segera dikembalikan. Di DIY, alhamdulillah lebih dari 90 persen sudah tertunaikan, dan ini patut kita apresiasi,” kata Ahmad Syauqi dalam pertemuan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY.

BPK DIY melaporkan bahwa hingga Semester I 2025, dari 6.480 rekomendasi senilai Rp233,20 miliar, sebanyak 94,77 persen telah sesuai dengan ketentuan senilai Rp36,68 miliar. Meski demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja, masih terdapat 1.660 permasalahan ketidakefektifan kinerja, terutama dalam pengelolaan APBD, pelayanan kesehatan,



Pertemuan BAP DPD RI dengan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kami hadir memastikan hasil pemeriksaan BPK benar-benar ditindaklanjuti. Prinsipnya sederhana, jika ada kerugian negara harus segera dikembalikan. Di DIY, alhamdulillah lebih dari 90 persen sudah tertunaikan, dan ini patut kita apresiasi.**”

**Ketua BAP DPD RI,
Ahmad Syauqi
Soeratno**

pendidikan dasar, dan penanganan kemiskinan.

Sorotan lain adalah pemeriksaan tematik pembangunan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan persampahan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, serta penanganan bencana di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul sesuai dengan Renstra

BPK dan isu yang sedang berkembang.

“Kendala yang dihadapi pemda dalam pemeriksaan audit tematik yaitu keterbatasan anggaran untuk sarana prasarana, keterbatasan SDM, ketersediaan lahan, hingga penolakan masyarakat terhadap lokasi pengolahan sampah. Rekomendasi kami yaitu koordinasi dengan pemda untuk mendukung pemenuhan sarana prasarana dan sosialisasi intensif kepada masyarakat,” jelas Kepala Perwakilan BPK DIY Agustin Sugihartatik.

Hasil kunjungan ini akan dirumuskan BAP DPD RI menjadi rekomendasi kebijakan dan dibawa ke tingkat pusat. BAP memastikan aspirasi daerah akan disampaikan dalam rapat bersama kementerian terkait serta Sidang Paripurna DPD RI untuk memperkuat tata kelola keuangan negara di daerah. (*)

Sekjen DPD RI Buku Adalah Jendela Dunia

Adhi Nugroho

Penulis

Dalam kegiatan literasi bertema “Membaca untuk Bertumbuh - *Let's chill in the garden with some books*”, Jumat (29/8/2025), Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mohammad Iqbal mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan budaya membaca sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

Mohammad Iqbal menjelaskan bahwa kegiatan yang diadakan tersebut bukanlah tentang pertumbuhan fisik, melainkan pertumbuhan jiwa, pikiran, dan karakter. “Setiap kali kita membuka sebuah buku, kita sedang menanam benih pengetahuan, empati, dan inspirasi. Sama seperti tanaman yang membutuhkan air dan cahaya, jiwa dan pikiran kita membutuhkan kata-kata dan gagasan untuk berkembang,” kata Iqbal.

Menurutnya, membaca mampu memperluas wawasan, menumbuhkan empati, serta membangkitkan cita-cita. Dengan membaca, seseorang seperti melihat jendela dunia karena dapat menjelajah lintas ruang dan waktu, memahami berbagai budaya, hingga merasa-



Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal bersama peserta kegiatan literasi bertema “Membaca untuk Bertumbuh - *Let's chill in the garden with some books*”, Jumat (29/8/2025). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“
Buku memberi kita teladan, menambah wawasan baru, dan membakar semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
”

**Sekretaris Jenderal
DPD RI,
Mohammad Iqbal**

akan pengalaman orang lain melalui kisah yang dibacanya. “Buku memberi kita teladan, menambah wawasan baru, dan membakar semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri,” kata Iqbal.

Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar

acara seremonial, tetapi juga sebuah perayaan, ajakan, sekaligus pengingat agar masyarakat semakin *aware* terkait literasi. Karena itu, dia mengajak peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali semangat membaca sekaligus *refresh* sejenak dari aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan.

“Melalui rangkaian kegiatan literasi yang diselenggarakan DPD RI ini, saya berharap agar peserta tidak hanya pulang membawa buku baru, tetapi juga membawa semangat baru untuk terus membaca dan bertumbuh setiap hari,” kata Mohammad Iqbal, yang pernah menjadi Kapolda Riau itu. (*)

dr. Maria Stevi Harman:

Dokter Muda NTT yang Melangkah ke Senayan

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Di usia yang masih muda, dr. Maria Caecilia Stevi Harman mencatatkan diri sebagai salah satu senator perempuan yang mewakili Nusa Tenggara Timur (NTT) di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024–2029. Lahir pada 13 September 1995, Stevi tumbuh dalam keluarga yang kental dengan dunia politik dan pelayanan publik. Ayahnya adalah Benny K. Harman, politikus senior Partai Demokrat, sementara ibunya berprofesi sebagai dokter. Perpaduan dua dunia inilah yang membentuk watak Stevi di satu sisi berakar pada dunia kesehatan, di sisi lain tak asing dengan dinamika politik.

Pendidikan menjadi fondasi kuat bagi Stevi. Ia menempuh studi kedokteran di Universitas Indonesia hingga meraih gelar dokter, kemudian memperdalam bidang penelitian medis di Universitas Monash, Australia. Pengalaman akademis lintas negara memberinya perspektif luas tentang pentingnya kesehatan sebagai sektor fundamental pembangunan. Usai menyelesaikan studi, ia mengabdikan diri di sejumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Pasir Panjang, Puskesmas Manutapen, dan RSUD SK Lerik Kupang. Dari pengalaman itulah, ia melihat secara langsung keterbatasan layanan kesehatan yang dihadapi masyarakat NTT.

Selain dunia medis, Stevi juga terjun ke ranah usaha. Ia menjabat sebagai Direktur PT. Dawai Sejahtera yang bergerak di bidang peternakan, pertanian, dan pariwisata. Aktivitas bisnis ini kian mengasah kepekaannya pada isu kemandirian ekonomi lokal. Stevi memahami bahwa kesehatan masyarakat tak bisa dilepaskan dari kesejahteraan ekonomi. Karena itu, ketika memutuskan maju lewat jalur DPD RI pada Pemilu 2024, ia menekankan dua agenda utama: memperkuat layanan kesehatan dan meningkatkan



(Foto Kompasiana)

daya saing ekonomi daerah.

Langkahnya ke panggung politik nasional terbukti mendapat dukungan luas. Pada Pemilu 2024, Stevi meraih 405.579 suara dan menjadi salah satu peraih suara tertinggi di dapil NTT. Terpilihnya Stevi dipandang sebagai representasi generasi muda NTT yang berani tampil di kancah politik nasional, sekaligus menandai regenerasi politik di tengah dominasi wajah-wajah lama. Publik menaruh harapan besar padanya untuk membawa angin segar di lembaga senator.

Sebagai anggota DPD RI, Stevi kini tercatat aktif di Komite III yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Ia terlibat dalam rapat bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk mengawasi implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam forum itu, ia menekankan pentingnya pemerintah daerah membentuk regulasi khusus agar hak-hak penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak, benar-benar terlindungi. Tidak berhenti di meja rapat, Stevi juga turun langsung ke masyarakat dengan memberi dukungan konkret, misalnya bantuan mesin perajang singkong bagi kelompok UMKM di Manggarai Timur.

Visi Stevi sederhana namun kuat: membunikan kebijakan agar terasa langsung manfaatnya di desa-desa. Baginya, politik bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan jalan memperbesar dampak dari profesinya sebagai dokter. Tantangan yang ia hadapi tentu tidak ringan mulai dari minimnya infrastruktur kesehatan, terbatasnya anggaran, hingga lemahnya regulasi daerah. Namun, sebagai sosok muda dengan latar belakang medis dan kepedulian sosial, Stevi percaya bahwa politik bisa menjadi sarana untuk merajut harapan masyarakat NTT agar hidup lebih sehat, sejahtera, dan inklusif. (*)

Ivanda Awalina Firdausi Sukandar:

Senator Muda dari Jambi dengan Akar Keluarga Politik

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Ivanda Awalina Firdausi Sukandar muncul sebagai salah satu wajah baru di lembaga perwakilan daerah ketika terpilih menjadi Anggota DPD RI periode 2024–2029 mewakili Provinsi Jambi. Lahir di Jakarta pada 11 Mei 1996, Ivanda masih muda namun telah menunjukkan keseriusan di ranah politik publik. Kehidupannya selalu berkaitan dengan dunia politik; dia adalah putri dari Sukandar, mantan Bupati Tebo dua periode, dan Saniatul Lativa, yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI.

Pendidikan Ivanda dilalui di berbagai tempat, menunjukkan mobilitas dan paparan budaya lebih luas sejak dini. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 18/VIII Muara Tebo, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA Budi Utomo di Jombang, Jawa Timur. Setelah SMA, Ivanda memilih fokus pada dunia kreatif: ia belajar Diploma 3 dalam Fashion Design di Instituto di Moda Burgo, yang campurannya antara Jakarta dan Milan dalam kurikulumnya.

Meski masih tergolong dari generasi muda dan pendatang baru di kursi senator, Ivanda memperoleh dukungan yang cukup solid di Pemilu 2024.



(Foto Ist)

Dia meraih 272.892 suara sebagai wakil DPD dari Jambi, angka yang menunjukkan bahwa pemilih menerima tawaran baru di antara banyak calon senator. Pemilu ini menandai langkah awal Ivanda untuk bergerak dari latar belakang keluarga politik menuju peran legislatif di tingkat nasional.

Dalam kancah tugasnya sebagai senator, Ivanda telah menunjukkan kepedulian terhadap isu lokal di Jambi, terutama berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, aspirasi pemuda, dan pembangunan yang inklusif. Misalnya, dia aktif melakukan audiensi dengan pelaku UMKM untuk mendengar langsung kebutuhan mereka. Peran-peran seperti ini menjadi bagian dari upaya memberdayakan masyarakat daerah, bukan hanya menyuarakan, tetapi menerjemahkan aspirasi ke dalam aksi nyata.

Meskipun kini menjabat

sebagai senator dari Jambi, Ivanda memiliki domisili yang lebih banyak di Jakarta hal ini mencerminkan mobilitasnya, serta koneksi ke pusat pemerintahan dan media yang mungkin mempermudah pekerjaannya sebagai wakil daerah. Tantangan yang dihadapinya termasuk menjaga agar kedekatan fisik dan komunikasi dengan konstituen di daerah tetap kuat, terutama karena Jambi memiliki daerah-daerah yang jauh, dan budaya lokal yang khas.

Visi Ivanda tampak berupaya menyelaraskan identitas muda, kreatif, dan akar lokal. Dia mewakili harapan generasi yang ingin melihat wajah baru dalam politik tidak hanya karena garis keturunan, tetapi juga karena kemampuan, gagasan segar, serta keinginan untuk bekerja nyata. Dengan latar belakang fashion design yang mungkin sedikit jauh dari kenormalan politik, Ivanda menunjukkan bahwa keahlian dan pengalaman non-tradisional bisa menjadi modal penting dalam memperluas ruang aspirasi publik. Tantangan ke depan tetap besar: dari mewujudkan regulasi yang berpihak, fasilitasi peluang ekonomi lokal, hingga menjaga janji-janji politik agar terasa manfaatnya di desa-desa dan kampung-kampung. (*)

Tenun Ikat Sekomandi: Menenun Doa, Merajut Waktu



(Foto Antara)

Theresia Oktavina

Penulis

Di sebuah sudut Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, terdengar suara halus kayu memukul benang. Di rumah panggung sederhana, tangan-tangan perempuan Mandar bekerja tanpa lelah, mengikat benang satu per satu, seolah menulis doa dalam diam. Inilah tenun ikat Sekomandi, karya seni tekstil yang bertahan lebih dari 500 tahun. Bagi suku Pitu Ulunna Salu, sehelai kain bukan sekadar penutup tubuh, melainkan cermin identitas, kebanggaan, dan doa yang diwariskan lintas generasi.

Nama Sekomandi berasal dari “seko” (satu) dan “mandi” (rumah/keluarga). Dalam filosofi Mandar, kain ini simbol kebersamaan dan ikatan batin. Dahulu, Sekomandi hanya digunakan pada momen sakral:

pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, atau upacara adat memohon keberkahan. Setiap motif bercerita, seperti Bomba Cokko melambangkan kesuburan atau Karoro berbentuk gelombang laut sebagai simbol keberanian.

Proses pembuatannya ibarat perjalanan spiritual. Benang kapas dipintal, diwarnai dengan bahan alami dari dedaunan, kulit kayu, dan akar hutan, lalu diikat sebelum dicelupkan untuk melahirkan motif penuh makna. Membuat satu helai kain bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ada Bomba Batu yang melukiskan kekuatan, Pammuli sebagai penghormatan pada leluhur, Tappo Bulao tentang keteguhan prinsip, dan Sappebulu yang memuliakan gotong royong. Setiap simpul dan helai benang adalah doa sunyi bagi kehidupan.

Kini, Sekomandi bertrans-

formasi. Dari kain adat sakral, ia hadir dalam busana modern, aksesoris, dan dekorasi rumah. Pemerintah daerah dan komunitas perajin menjaga tradisi ini melalui pelatihan, pameran, dan festival budaya. Generasi muda memadukan motif kuno dengan sentuhan kontemporer tanpa menghilangkan maknanya. Sekomandi pun mulai menjejak pasar nasional bahkan internasional, memperkenalkan keindahan budaya Sulawesi Barat kepada dunia.

Namun menjaga tradisi bukanlah perkara mudah. Pewarna alami kian langka, penenun senior menua, dan arus tekstil pabrikan terus menekan. Sebagian generasi muda memilih merantau, meninggalkan alat tenun yang sunyi menunggu sentuhan. Meski begitu, ada harapan. Semangat para perempuan Mandar, ditopang perlindungan hak kekayaan intelektual dan promosi wisata budaya, membuat cahaya Sekomandi tetap menyala.

Sekomandi bukan sekadar kain, melainkan mahakarya yang menenun sejarah, doa, dan jati diri. Setiap helai adalah kisah tentang keberanian, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Di tengah riuh modernisasi, Sekomandi menjadi bisikan lembut yang mengingatkan kita akan akar budaya. Warisan ini bukan hanya dijaga; ia hidup, bernafas, dan terus bercerita, menembus batas waktu untuk generasi mendatang. (*)

Sekomandi Ikat Weaving: Weaving Prayers, Knitting Time



(Antara News Foto)

Theresia Oktavina

Writer

In a quiet corner of Central Mamuju, West Sulawesi, the soft sound of wood tapping against thread fills the air. Inside a modest stilt house, Mandar women work tirelessly, tying threads one by one as if silently writing prayer. This is Sekomandi ikat weaving, a textile art that has endured for over 500 years. For the Pitu Ulunna Salu tribe, a piece of fabric is cloth more than just a body covering as it is rather a mirror of identity, pride, and ancestral blessings passed down through generations.

The name Sekomandi originates from “seko” meaning “one” and “mandi” meaning “home” or “family.” In Mandar philosophy, the fabric symbolizes unity and an unbroken spiritual bond. In the past, Sekomandi was only

worn for sacred occasions: weddings, welcoming honourable guests, or traditional ceremonies asking for blessings. Each motif tells a story, for instance Bomba Cokko symbolizes fertility, while Karoro, featuring ocean waves, symbolizes courage in facing life’s challenges.

The making of Sekomandi resembles a spiritual journey. Cotton threads are spun, dyed with natural pigments from leaves, tree bark, and roots, then tied before immersion to create meaningful motifs. Crafting a single sheet can take weeks or even months. Motifs like Bomba Batu featuring strength, Pamuli featuring respect to ancestors, Tappo Bulao reflects steadfast principles, and Sappebulu glorifying communal harmony. Every knot, every strand, conceives a silent prayer for life.

Today, Sekomandi has transformed. From once a sacred

traditional fabric to showing in modern fashion, accessories, and home décor. Local administration and artisan communities work together to preserve this heritage through training programs, exhibitions, and cultural festivals. The young generation is combining ancient motifs with contemporary touches without losing their meaning. Sekomandi is penetrating national even international market, showcasing the cultural beauty of West Sulawesi to the world.

Yet, preserving tradition is not an easy task. Natural dyes are becoming scarce, senior weavers are aging, and mass-produced textiles keep pressing. Some young people choose to migrate, abandoning their looms silently awaiting touch. Still, hope remains. The passion of Mandar women, supported by intellectual property protection and cultural tourism promotion, keeping the light of Sekomandi shining.

Sekomandi is more than just fabric, it is rather a masterpiece that weaves history, prayers, and identity. Each piece tells a story of courage, unity, and reverence toward ancestors. Amidst the noise of modernity, Sekomandi whispers softly, reminding us of our cultural root. The heritage is not merely preserved; it lives, breathes, and continues to tell stories transcending time for generations to come. (*)

Maluku Utara Menyibak Tabir Surga di Timur



(Foto cermat)

Lela Sadiyah

Penulis

Jika Anda mencari surga tersembunyi di timur Indonesia, Maluku Utara adalah jawabannya. Di antara gugusan pulau tropisnya, terdapat destinasi memukau yang belum banyak terjamah wisatawan: Pulau Mare. Pulau mungil ini hanya berjarak sekitar 30 menit dari Kota Tidore, tetapi atmosfernya terasa begitu berbeda. Hamparan pasir putih berpadu dengan hutan bakau, sementara debur ombak tenang menjadi musik alami yang menenangkan jiwa.

Bagi para penyelam, Pulau Mare adalah permata bawah laut yang belum ternodai wisata massal. Terumbu karangnya masih

perawan, dihuni ikan-ikan tropis warna-warni, dan di beberapa titik, dinding karang menjulang bak tebing bawah laut. Snorkeling di sini serasa menjelajahi akuarium raksasa alami, dengan pemandangan yang tak kalah indah dibanding Raja Ampat.

Tak jauh dari sana, Pantai Tanjung Akeuna menjadi surga sunyi bagi mereka yang mencari ketenangan. Untuk mencapainya, Anda harus melewati jalan setapak berbatu dan hutan kecil, tetapi perjuangan ini sepadan. Saat senja tiba, langit berubah menjadi kanvas oranye keemasan, memantulkan cahaya lembut di permukaan laut. Momen ini adalah suguhan magis bagi pecinta fotografi.

Selain keindahan alamnya, Maluku Utara juga

kaya akan warisan sejarah. Benteng Kalamata, peninggalan Portugis abad ke-16, menjadi saksi bisu perebutan rempah-rempah di masa lalu. Dari atas benteng, panorama laut biru dan siluet Gunung Tidore terlihat begitu memukau. Rasanya seperti melangkah mundur ke masa keemasan perdagangan dunia.

Keunikan Maluku Utara tak lengkap tanpa keramahan warganya. Masyarakat Pulau Mare hidup sederhana dengan tradisi maritim yang kuat. Mereka kerap mengajak wisatawan menikmati kuliner khas seperti ikan asar dan sagu lempeng sambil berbagi kisah tentang leluhur dan laut. Duduk bersama mereka di tepi pantai, ditemani angin laut dan aroma ikan asap, adalah pengalaman otentik yang membekas di hati.

Jika Anda ingin menemukan keindahan alami yang belum banyak disentuh, Maluku Utara adalah panggilanannya. Pulau Mare, Tanjung Akeuna, dan jejak sejarah rempah-rempahnya menghadirkan perjalanan yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga memperkaya jiwa. Ini adalah tentang kembali pada esensi Indonesia liar, murni, dan penuh kejutan. (*)

North Maluku

Unveiling the Hidden Paradise of the East



(Ratnadewi foto)

Lela Sadiyah

Writer

If you're searching for a hidden paradise in eastern Indonesia, North Maluku is revealing. Among its cluster of tropical gems mesmerizing destination hidden to tourists: Pulau Mare, a cute island just a 30-minute boat ride from Tidore, which has a very distinct atmosphere. An expanse of white sands blends with lush mangroves, while a calm rhythm of wave turns into a soothing natural music. Time seems to slow down, allowing visitors to reconnect with nature in its purest form.

To scuba divers and snorkelling enthusiasts, Pulau Mare is an underwater gem

unmolested by mass tourism. Its coral reefs are still virgin, inhabited by colourful tropical fish. At certain spots, stand towering steep sea edge. Snorkelling here feels like exploring a giant natural aquarium, with scenic view not inferior to Raja Ampat.

Just a short distance away lies Tanjung Akeuna Beach, a quiet paradise to those seeking tranquillity. To reach the place requires some trekking effort through rocky paths and small forest trails but the reward is well worth it. As sunset arises, the sky changes into golden orange canvas, reflecting softly the water surface. It is a magical moment for photography enthusiasts.

Besides its enchanting

scenery, North Maluku is also rich with historical heritage. Kalamata fortress, a legacy of the Portuguese in 16th century is a silent witness to the struggle for spices in the past. From atop the fortress walls, the panorama of the bluish sea and the silhouette of Tidore mountain are so mesmerizing. The feeling is like returning to the golden era of the world trade.

The uniqueness of North Maluku is incomplete without the hospitality of its locals. The inhabitant of Mare Island lives in simplicity with their solid maritime tradition. They frequently invite tourists to enjoy typical cuisine such as grilled Asar fish and sago snack while sharing the tales of their ancestors and the sea. Sitting together by the seashore, accompanied by the sea breeze and the scent of smoke fish is unforgettable authentic experience.

When you are seeking barely touched natural beauty, North Maluku beckons. Pulau Mare, Tanjung Akeuna, and its spices history present not only eye-soothing travel but also enriching the soul. Herein lies the essence of wild Indonesia, authentic and full of surprises. (*)

Nusa Tenggara Timur

Menemukan Sumba, Menemukan Diri



(Foto Sambodo.instagram)

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Saat mendengar Nusa Tenggara Timur (NTT), kebanyakan orang langsung memikirkan Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Padahal, NTT punya sisi lain yang lebih sunyi, lebih intim, dan sama memesonanya: Sumba. Salah satu destinasi tersembunyi yang memukau adalah Pantai Watu Maladong di Sumba Barat Daya. Batu-batu karang raksasa berdiri kokoh di tengah laut, membentuk lanskap dramatis yang jarang ditemui di pantai-pantai lain di Indonesia. Ombaknya tenang, pasirnya lembut, dan suasananya begitu hening, seolah alam bersekongkol untuk memberikan ketenangan.

Pantai ini juga menyimpan legenda lokal yang mem-

perkaya pengalamannya. Penduduk percaya batu-batu karang megah tersebut adalah jelmaan prajurit kuno yang dikutuk karena melanggar sumpah adat. Saat air laut surut, wisatawan bisa berjalan mendekat dan melihat guratan alami ombak di permukaan karang, seolah waktu sendiri ikut melukis keindahannya.

Bergeser dari pantai, Sumba menawarkan Bukit Wairinding, padang sabana luas dengan kontur bergelombang yang memanjakan mata. Hamparannya berubah warna sesuai musim: hijau segar saat musim hujan, lalu keemasan saat musim kemarau. Dari puncaknya, panorama matahari terbenam terasa begitu syahdu, menghadirkan kesunyian yang membuat kita merasa menjadi bagian dari alam itu sendiri.

Bagi pecinta petualangan, Air Terjun Tanggedu adalah destinasi wajib. Julukannya sebagai Grand Canyon-nya Sumba bukan tanpa alasan. Tebing batu kapur putih yang menjulang tinggi mengapit aliran air jernih yang membentuk kolam-kolam alami di bawahnya. Meski harus berjalan kaki sekitar tiga kilometer untuk mencapainya, setiap tetes keringat akan terbayar lunas oleh pesona air terjun yang memikat.

Keunikan Sumba tak hanya soal alamnya, tapi juga budayanya. Mengunjungi desa adat seperti Praijing membawa kita pada kehidupan tradisional yang masih terjaga. Rumah-rumah beratap tinggi, ritual Pasola yang sarat makna, dan kain tenun ikat khas Sumba menjadi bukti kekayaan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Interaksi dengan masyarakat lokal menghadirkan perspektif baru tentang harmoni manusia dan alam.

Di Sumba, waktu seolah berjalan lebih lambat. Alamnya memeluk dengan keindahan, budayanya mengajarkan kesederhanaan, dan setiap sudutnya menghadirkan ketenangan. Jika Anda mendambakan pelarian dari keramaian, Sumba adalah jawabannya. Di sini, Anda tak hanya menemukan surga tersembunyi, tetapi juga menemukan kembali diri sendiri. (*)

Nusa Tenggara Timur

Finding Sumba, Discovering Self



(Foto Trip Sumba)

Fandi Tri Prayogo

Writer

Upon hearing Nusa Tenggara Timur (NTT), most people straight away imagine Labuan Bajo and Komodo Island. As a matter of fact, NTT has other quatter and more intimate sides which are equally enchanting: Sumba. One of hidden fascinating destinations is Watu Maladong in Southwest of Sumba. Rock boulders stand firm in the middle of the sea, forming a dramatic landscape rarely found in other Indonesian beaches. The monotonous calm wave, soft sand, and quiet ambient

exhibit as if nature collaboratively produce tranquillity.

The beach also preserves experience-enriching local myth. The locals believe the magnificent rock boulders were the incarnation of ancient troops who were cursed because of breaking their traditional vows. During low tide, visitors can approach and see up close the natural inscription of above-rock waves, featuring as if time were painting its beauty by itself.

Moving a little bit, Sumba offers Bukit Warinding, a vast savanna with eye-soothing landscape. The expanse changes colour in accordance to seasons: freshly green dur-

ing rainy season, beige during dry season. From the top is the sunset panorama elegantly proceeding, presenting tranquillity which elevates us to be part of nature itself.

To adventurer enthusiasts, Tanggedu waterfall is a must-visit destination. Its nickname as Grand Canyon of Sumba is not baseless. The towering white limestone cliffs flank a clear water flow, forming natural pools beneath. Despite having to walk about three kilometres to reach the place, every drop of sweat will be fully compensated by the fascinating water fall scenery.

The peculiarity of Sumba lays not only on its nature but also on its culture. Visiting traditional villages such as Praijing brings us to intact traditional living. High-roof houses, meaningful Pasola ritual, and typical Sumba ikat weaving are solid evidence of timeless cultural heritage. Interaction with the locals presents new perspective concerning man-nature harmony.

In Sumba, time seemingly moves slower. Its nature embraces beauty, its culture teaches simplicity, and its every corner presents tranquillity. If you are longing for an escape from daily hustle and buzzle, Sumba is the solution. Here will you not only a hidden paradise, but you will also re-discover yourself (*)

Ikan Kuah Asam

Rasa Segar dari Maluku



(Foto tradisi kuliner)

Rini Sumarni

Penulis

Di tanah Maluku, laut bukan sekadar hamparan biru yang menenangkan mata, tetapi juga sumber inspirasi kuliner. Salah satu hidangan tradisional yang wajib dicoba ketika berkunjung ke “Negeri Rempah” ini adalah Ikan Kuah Asam. Hidangan ini memadukan kesegaran ikan hasil tangkapan nelayan dengan kuah bening beraroma rempah yang segar dan asam alami. Bukan hanya sekadar makanan, sajian ini adalah representasi hubungan erat masyarakat Maluku dengan laut.

Rahasia kelezatan Ikan

Kuah Asam terletak pada kesederhanaannya. Ikan segar umumnya ikan kakap, cakalang, atau baronang direbus bersama air, serai, daun kemangi, tomat, dan belimbing wuluh. Tak ada santan, tak ada bumbu yang rumit, tetapi rasa yang dihasilkan begitu memikat. Perpaduan rasa gurih ikan, asam belimbing, dan harum daun kemangi menciptakan sensasi segar yang langsung menyapa lidah sejak suapan pertama.

Selain nikmat, Ikan Kuah Asam juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Maluku. Dalam tradisi mereka, laut adalah sumber kehidupan, dan hidangan ini adalah wujud rasa syukur atas

berkah hasil tangkapan. Tak heran jika sajian ini hampir selalu hadir di meja makan saat keluarga besar berkumpul, menjadi pengikat keakraban yang tak lekang oleh waktu.

Sensasi menikmati Ikan Kuah Asam terasa lebih lengkap bila disantap di tepi pantai, ditemani suara ombak dan semilir angin laut. Restoran-restoran tradisional di Ambon atau Ternate kerap menyajikan menu ini dengan nasi panas dan sambal colocolo, sambal khas Maluku berbahan dasar irisan cabai, bawang, dan tomat yang makin memperkuat karakter rasa.

Bagi wisatawan, mencicipi Ikan Kuah Asam bukan sekadar pengalaman kuliner, tetapi juga perjalanan budaya. Setiap sendoknya membawa kita memahami bagaimana rempah, laut, dan kehidupan berpadu harmonis di Maluku. Hidangan ini adalah cara terbaik untuk merasakan identitas daerah yang pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia.

Jika Anda mencari kuliner yang menghadirkan kesegaran alami, ringan, dan penuh cita rasa, Ikan Kuah Asam Maluku adalah jawabannya. Ia sederhana, tetapi mampu meninggalkan kesan mendalam yang membuat Anda ingin kembali merasakannya. (*)

Sour Fish Soup A Fresh Taste from Maluku

Rini Sumarni

Writer

In the land of Maluku, the sea is not only a vast blue expanse soothing to the eyes, but it is also a source of culinary inspiration. One traditional dish that should not be missed when visiting this “Spice Land” is Ikan Kuah Asam or Sour Fish Soup. This dish combines the freshness of freshly caught fish with a clear broth infused with fragrant spices and natural tamarind.

More than just food, it is a representation of the close bond between the people of Maluku and the sea.

The secret to the savour of Ikan Kuah Asam lies in its simplicity. Fresh fish usually snapper, skipjack, or rabbitfish are simmered with water, lemongrass, basil leaves, tomatoes, and belimbing wuluh (bilimbi fruit). There is no coconut milk, neither is there complicated spices, yet the flavour produced is truly captivating. The combination of the tasty fish, the tang of bilimbi, and the fragrance of basil creates a refreshing sensation that meets the palate from the very first bite.

Besides being tasty, Ikan Kuah Asam also reflects



(Viva Banyuwangi Photo)

the philosophy of life of the Maluku people. In their tradition, the sea is a source of life, and this dish embodies gratitude for the blessings of the catch. It is no wonder that this dish is almost always served on the dining table during family gatherings, serving as a timeless bond of togetherness.

The sensation of enjoying Ikan Kuah Asam feels even more complete when eaten by the beach, accompanied by the sound of waves and the gentle sea breeze. Traditional restaurants in Ambon or Ternate often serve this dish with hot rice and sambal colocolo, Maluku’s typical chilli paste made of sliced

chilies, onions, and tomatoes, which further enhances its tasty character.

For travellers, tasting Ikan Kuah Asam is not just a culinary adventure, but it is also a cultural journey. Each spoonful brings us to appreciate how spices, the sea, and daily life blend harmoniously in Maluku. The dish is one of the best ways to feel the identity of a region once known as the centre of the world’s spice trade.

If you are looking for cuisine that offers natural freshness, light and rich in flavours, Maluku’s Ikan Kuah Asam is the answer. It is simple yet capable to leave a lasting impression that makes you longing for its taste. (*)

Gudeg Manggar Manisnya Tradisi Kuliner Yogyakarta

Adhi Nugroho

Penulis

Ketika menyebut Yogyakarta, pikiran banyak orang langsung tertuju pada gudeg nangka, ikon kuliner manis khas kota ini. Namun, ada satu varian gudeg yang lebih langka dan nyaris tak dikenal banyak orang: Gudeg Manggar. Berbeda dari gudeg nangka muda yang populer, gudeg ini menggunakan bunga kelapa muda atau manggar sebagai bahan utamanya, menciptakan cita rasa unik yang kaya sejarah dan sarat makna.

Konon, Gudeg Manggar adalah sajian para bangsawan Keraton Yogyakarta sejak zaman Mataram. Hidangan ini dulunya hanya disajikan pada acara-acara khusus seperti pesta pernikahan keraton atau upacara adat. Tekstur manggar yang lembut dipadukan dengan cita rasa manis gurih dari bumbu kelapa, gula merah, dan santan, menghadirkan sensasi berbeda dari gudeg nangka yang biasa kita kenal.

Proses memasaknya pun istimewa. Bunga kelapa muda dipotong kecil, lalu dimasak perlahan selama berjam-jam bersama bumbu halus yang terdiri dari bawang merah,



(Foto Iqbal Diaspora)

bawang putih, kemiri, lengkuas, dan daun salam. Waktu memasak yang lama membuat bumbu meresap sempurna, menghasilkan gudeg berwarna kecokelatan pekat dengan aroma harum menggoda.

Gudeg Manggar umumnya disajikan bersama krecek, opor ayam kampung, dan sambal goreng tempe, menciptakan harmoni rasa manis, gurih, dan sedikit pedas dalam satu piring. Kombinasi ini adalah cerminan budaya Jawa yang mengedepankan keseimbangan rasa dan kelembutan dalam setiap sajian.

Hidangan ini kini semakin jarang ditemukan karena ba-

han utamanya, bunga kelapa muda, tidak selalu tersedia. Beberapa warung tradisional di Bantul dan sekitar Yogyakarta masih setia mempertahankan resep turun-temurun, menjadikan Gudeg Manggar sebagai kuliner eksklusif bagi mereka yang benar-benar ingin menelusuri jejak sejarah rasa Jawa.

Bagi pencinta kuliner, Gudeg Manggar bukan hanya soal menikmati makanan, tetapi juga merasakan warisan budaya yang nyaris hilang. Setiap suapan adalah undangan untuk kembali ke masa lalu, memahami nilai-nilai tradisi, dan merayakan kekayaan kuliner Nusantara yang tak ternilai. (*)

Gudeg Manggar

The Sweetness of Yogyakarta's Culinary Tradition



(Indonesia Kaya Photo)

Adhi Nugroho

Written

When mentioning Yogyakarta, majority of people's minds straight away go to *gudeg nangka*, the iconic sweet dish of the city. Yet, there is a rarer and almost forgotten variant: *Gudeg Manggar*. Unlike the popular young jackfruit *gudeg* version, the dish uses young coconut blossoms, or *manggar*, as its main ingredient, creating a unique flavour rich in history and meaning.

Legend has it that *Gudeg Manggar* was once a dish re-

served for Yogyakarta's royal family during Mataram era. It was used to be served only on special occasions such as royal weddings or ceremonial rituals. The soft texture of the coconut blossoms, combined with the sweet and savory flavors of coconut seasoning, palm sugar, and coconut milk, produces a distinctive sensation unlike the familiar jackfruit *gudeg*.

The cooking process itself is special too. The young coconut blossoms are finely chopped and then slowly simmered for hours with a paste of spices made of shallots, garlic, candlenut,

galangal, and bay leaves. The long cooking time allows the flavours to seep deep, producing a dark brown dish with enticing aroma.

Gudeg Manggar is usually served with *krecek* (spicy beef skin stew), free-range chicken cooked in coconut milk, and spicy fried *tempeh*, creating a harmony of sweet, savoury, and slightly spicy sensation on a single plate. The combination reflects Javanese culture, which promotes taste balance and gentleness in every meal.

Today, the dish is increasingly rare, as its main ingredient, i.e. young coconut blossoms is not always available. A few traditional eateries in Bantul and around Yogyakarta still faithfully preserve the ancestral recipe, making *Gudeg Manggar* an exclusive delicacy for those who truly wish to trace the historical flavour of Java.

For culinary enthusiasts, *Gudeg Manggar* is not just about eating a meal as it is also about experiencing a near-extinct cultural heritage. Each bite is an invitation to step back in time, to ponder upon traditional values, and to celebrate the priceless treasure of Indonesia's culinary legacy. (*)

Ekonomi Kapitalis sebagai Unsur Memberatkan: Analisis Yuridis atas Putusan Pengadilan dalam Kasus Thomas Lembong

Oleh:

Tunki Rachman Sanusi/(Analisis Kebijakan Ahli Pertama)

Kasus Thomas Trikasih Lembong telah menjadi kontroversi publik sejak putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. tanggal 18 Juli 2025 yang menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara. Salah satu unsur pemberat yang disebutkan majelis hakim ialah saat menjabat Menteri Perdagangan, Tom Lembong “mengedepankan sistem ekonomi kapitalis dibandingkan sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945”. Kontroversi publik muncul sebagai akibat dari pernyataan tersebut, apakah motivasi ekonomi pribadi dapat memengaruhi keputusan hukum pidana? Esai ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis argumentasi tersebut, serta menilai bagaimana hal itu berdampak pada prinsip keadilan dan objektivitas hukum.

Ekonomi kapitalis dan ekonomi Pancasila terdapat perbedaan secara mendasar dalam hal kepemilikan, tujuan, dan nilai. Kapitalisme, menurut Adam Smith, menempatkan alat

produksi dan keuntungan di tangan individu, dengan fokus pada laba melalui persaingan bebas. Sebaliknya, Mubyarto berpendapat bahwa ekonomi Pancasila mencerminkan keadilan sosial dan gotong royong dan berbasis usaha bersama yang dilandasi asas kekeluargaan. Meskipun kedua sistem ekonomi memiliki landasan nilai yang berbeda, dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menjelaskan apa peran dari sistem ekonomi dalam tindakan korupsi yang dituduhkan.

Selain itu, menganut

suatu sistem ekonomi bukanlah tindakan pidana, melainkan pilihan kebijakan atau ideologi pribadi. Menurut pakar hukum tata negara Prof. Mahfud MD di *chanel podcast* Rhenald Kasali, berpandangan bahwa “Kapitalisme adalah ide, jika ada norma yang mengatur barang siapa melakukan kapitalisme baru bisa dihukum”. Artinya setiap ide atau ideologi yang diyakini oleh setiap individu bukanlah tindak pidana, selama belum dijadikan sebuah norma tertulis dalam regulasi. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut mencerminkan adanya bias ideologis dalam proses peradilan, bukan hanya berdasarkan prinsip hukum yang adil dan rasional.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan yang melanggar hukum tidak boleh didasarkan pada ideologi atau preferensi sistem ekonomi, tetapi harus didasarkan pada tindakan yang melanggar hukum. Dalam hukum terdapat asas yang menyebutkan *nullum crimen sine poena legali* (tiada kejahatan tanpa pidana berdasarkan atau menurut undang-undang pidana)



atau biasa dikenal sebagai asas legalitas. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal 1 KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Berdasarkan asas ini, terlibat dalam sistem ekonomi kapitalis atau ekonomi pancasila tidak dilarang oleh hukum

pidana dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Selain itu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana

Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, ideologi atau pandangan ekonomi tidak termasuk dalam unsur tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, menjadikan keyakinan pribadi terhadap ekonomi kapitalis sebagai alasan pemberat tidak berdasarkan hukum, serta bertentangan dengan prinsip dasar dalam pemidanaan, yaitu objektivitas dan proporsionalitas. Seorang hakim, dalam menjalankan tugasnya, seharusnya memposisikan diri secara netral terhadap pandangan pribadi terdakwa, termasuk soal ideologi atau pilihan ekonomi, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan yang bebas dari bias dan prasangka. Menjadikan ideologi ekonomi sebagai alasan untuk memperberat hukuman tidak memiliki landasan kuat dalam UU Tipikor atau KUHP. Ini dapat dianggap sebagai penyimpangan yuridis yang melanggar prinsip legalitas dan perlindungan kebebasan berpikir yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945.

Dampak dari putusan tersebut menimbulkan respon yang kurang baik dimata publik, di mana pejabat publik atau pembuat kebijakan yang memiliki pandangan berbeda soal arah ekonomi bisa dianggap berisiko untuk dikriminalisasi. Kekhawatiran ini bukannya tanpa dasar; dalam kasus ini banyak yang mengartikan sebagai krimi-

nalisasi kebijakan, yaitu ketika keputusan administratif dijerat sebagai tindak pidana tanpa bukti yang jelas mengenai *mens rea* (niat jahat). Menurut Satjipto



(Ilustrasi Ist)

Rahardjo, “hukum bukan sekadar teks, melainkan konteks”, sikap progresif hukum yang menekankan konteks ideologi dalam interpretasi hukum dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik pada peradilan.

Penutup

Menjadikan orientasi ekonomi kapitalis sebagai pemberat dalam putusan Tom Lembong jelas tidak berdasar secara yuridis. Ini justru melemahkan dasar hukum pidana Indonesia, yaitu prinsip legalitas dan unsur objektivitas, selain itu juga dapat membatasi kebebasan berpikir yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Menurut saya keadilan hukum akan menjadi lebih kuat ketika penegakan hukum tidak terpengaruh oleh ideologi. Pemidanaan harus didasarkan pada tindakan yang melanggar hukum, bukan ideologi pribadi tentang sistem ekonomi atau kebijakan. Hukum harus tetap menjadi alat untuk keadilan substantif bukan untuk memaksakan ideologi. (*)



PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Mengucapkan



SELAMAT HARI

OLAH RAGA NASIONAL

9 September 2025



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

